

PEMULIHAN PEREKONOMIAN EUROPA BARAT
MELALUI PROGRAM MARSHALL PLAN

Suatu Analisis Terhadap Tujuan Bantuan Ekonomi Amerika Serikat
Kepada Eropa Barat Pasca Perang Dunia II

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal

Hadiah

5
Nomor

Pembelian

Terima Tanggal:

29 OCT 2002

327.93

Oleh :

No Induk :

AR1

P

C.1

Krisna Ariadi

NIM. 960910101041

Pembimbing :

Drs. Sunardi Purwoatmoko, MIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2002

**PEMULIHAN PEREKONOMIAN EROPA BARAT
MELALUI PROGRAM MARSHALL PLAN**
Suatu Analisis Terhadap Tujuan Bantuan Ekonomi Amerika Serikat
Kepada Eropa Barat Pasca Perang Dunia II

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S 1)
Jurusan Hubungan Internasional
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Oleh :

KRISNA ARIADI
NIM. 960910101041
Jurusan Hubungan Internasional

Pembimbing :
Drs: Sunardi Purwoatmoko, MIS

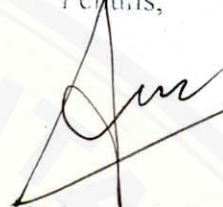
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

PERNYATAAN

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui.”

Penulis,



Krisna Ariadi



LEMBAR PENGESAHAN

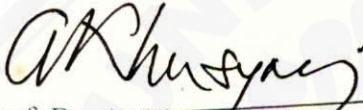
Dipertahankan dan Diterima di Hadapan Panitia Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juni 2002
Pukul : 08.00
Tempat : FISIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. A. Khusyairi, MA
NIP. 130 261 689

Sekretaris



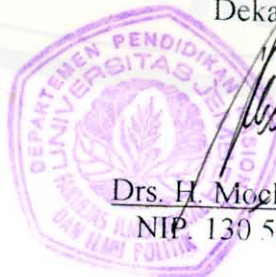
Drs. Sunardi Purwoatmoko, MIS
NIP. 131 325 932

Anggota

1. Prof. Dr. A. Khusyairi, MA
NIP. 130 261 689
2. Drs. Sunardi Purwoatmoko, MIS
NIP. 131 325 932
3. Drs. Umaidi Radi, MA
NIP. 130 239 058
4. Drs. Agung Purwanto, MSi
NIP. 132 056 184



Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

MOTTO

Lebih baik bertindak dan melakukan kesalahan, daripada takut melakukan kesalahan dan karenanya tidak pernah bertindak

Lebih baik bertindak dan melakukan kesalahan,
daripada takut melakukan kesalahan dan karenanya
tidak pernah bertindak.

(krisna)

PERSEMBAHAN

*“inna sholaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii
lillahi rabbil ‘aalamiin”^c*

Ibunda Sri Murniati,
yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, mengajarkan kesabaran
dalam menjalani kehidupan, dan menyertai melalui doa-doa

Ayahanda Budi Sudjono,
atas dorongan semangat dan doa, kesabaran dan kegigihan
dalam memikul beban pendidikan kami

Kakakku Risza Kusuma S.H.,
yang telah bersabar merelakan kesempatan
demi menanti keberhasilanku

Adikku Nani Kurnia Irawati,
yang telah memberikan motivasi melalui senyum dan candanya

Lohita Sofia Wisnuwardhani dan Kensafitri Primasari Ardini,
yang telah memberikan kasih sayang dan persahabatan sejati

^c Bagian dari do'a iftitah dalam sholat

Puji syukur kepada Allah S.W.T. atas karunia dan kesempatan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir studi di FISIP Universitas Jember.

Skripsi berjudul PEMULIHAN PEREKONOMIAN EROPA BARAT MELALUI PROGRAM MARSHALL PLAN : Suatu Analisis Terhadap Tujuan Bantuan Ekonomi Amerika Serikat Kepada Eropa Barat Pasca Perang Dunia II ini merupakan salah satu kasus dalam studi Ekonomi Politik Internasional yang mencoba menjelaskan adanya motivasi ekonomi dibalik tindakan politik Amerika Serikat dalam membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan wawasan pemikiran bagi pembacanya, khususnya untuk mahasiswa jurusan Hubungan Internasional. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Sunardi Purwoatmoko, MIS, selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional yang telah memperkenankan pengangkatan judul diatas sebagai tema utama skripsi.
3. Prof. DR. A. Khusyairi, MA, selaku dosen wali yang telah membantu penulis selama melaksanakan studi di jurusan Hubungan Internasional.
4. Drs. Moch. Toerki, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika FISIP Universitas Jember yang telah memberikan pengetahuan, ide dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan Pusat Universitas Jember atas bantuan yang diberikan dalam penelitian skripsi.
7. Kru ICON-Net : mas Yusuf, mas Elvana, Abdi, yang telah membantu pencarian data di internet.

8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan selama ini mendapat balasan yang sebanding dari Allah SWT.

Jember, Juni 2002



BAB II	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM MARSHALL PLAN	
2.1	Latar Belakang Program Marshall Plan	27
2.2	Tujuan Pelaksanaan Program Marshall Plan	28
2.3	Pengorganisasian Program Marshall Plan	31
2.3.1	The Conference for European Economic Cooperation	31
2.3.2	The Committee for European Economic Cooperation	32
2.3.3	The Economic Cooperation Administration (ECA)	33
2.3.4	The Organization for European Economic Cooperation (OEEC)	35
2.4	Distribusi Bantuan Marshall Plan	38
2.5	Hasil Program Marshall Plan	39
BAB III	PEMULIHAN PEREKONOMIAN EROPA BARAT DAN PENYELAMATAN PASAR AMERIKA SERIKAT DI EROPA BARAT	
3.1	Perubahan Kondisi Moneter Internasional Antara Dua Perang Dunia	43
3.2	Permasalahan Ekonomi Eropa Barat Pasca Perang Dunia II	44
3.3	Ancaman Uni Soviet Terhadap Ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat	45
3.4	Kekuatan Perekonomian Amerika Serikat	46
3.5	Penyelamatan Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat di Eropa Barat	51
3.5.1	Arti Ekonomis Eropa Barat Bagi Amerika Serikat	51
3.5.2	Penyelamatan Pasar Amerika Serikat di Eropa Barat	52
3.5.3	Kembalinya Eropa Sebagai Pasar Amerika Serikat	56

BAB IV	PEMBENDUNGAN TERHADAP PERLUASAN PENGARUH UNI SOVIET KE EROPA BARAT	
4.1	Perubahan Konstelasi Politik Internasional di Eropa	60
4.2	Ancaman Uni Soviet Terhadap Keamanan Eropa Barat	62
4.3	Pembendungan Terhadap Uni Soviet di Eropa Barat	66
4.3.1	Tekanan Ekonomi Amerika Serikat dan Demokratisasi Italia	67
4.3.2	Peran Amerika Serikat Dalam Penyatuan Jerman dan Demokratisasi Jerman	69
4.3.3	Keikutsertaan Amerika Serikat Dalam NATO	74
4.3.4	Bantuan Militer Amerika Serikat Kepada Eropa Barat	77
4.4	Dampak Pelaksanaan Kebijakan Pembendungan di Eropa Barat Bagi Amerika Serikat	80
BAB V	KESIMPULAN	81
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN	

DAFTAR-TABEL

Tabel 2.1	Marshall Plan Aid Distribution	39
Tabel 2.2	European Growth, 1890-1992	42
Tabel 3.1	Persentase Distribusi Ekspor & Impor Amerika Serikat Menurut Jenis Produk, 1941-1960	48
Tabel 3.2	Total Labor Force, 1929-1960	49
Tabel 3.3	Official Gold Reserves Selected Industrialized Countries	50
Tabel 3.4	Persentase Distribusi Ekspor Amerika Serikat Berdasarkan Benua, 1941-1960	52
Tabel 3.5	Bantuan Ekonomi Dan Teknis Amerika Serikat Kepada Negara- Negara Tertentu, Juli 1945 – Desember 1964	55
Tabel 3.6	The Share Of Europe, The U.K. And Canada In The Value Of U.S. Exports And Imports, 1880-1960	57
Tabel 4.1	Bantuan Militer Amerika Serikat Berdasarkan Wilayah, 1945-1958	79

BAB I
PENDAHULUAN



MIRKA UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Marshall Plan atau European Recovery Program (ERP) adalah program bantuan finansial Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa Barat untuk membangun kembali perekonomian negara-negara tersebut yang hancur akibat Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, sistem ekonomi dan politik Eropa mengalami kerusakan berat. Prasarana modal (*capital equipment*) mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan segera. Berkurangnya jumlah persediaan emas dan dolar menimbulkan kesulitan untuk melakukan impor barang-barang yang penting sehingga mengharuskan penggunaan fasilitas yang tersisa secara efisien. Kekurangan bahan makanan dan terjadinya inflasi menurunkan produktivitas buruh, menipisnya persediaan batu bara, baja dan bahan bahan dasar lain menghambat produksi, dan musim dingin berat yang terjadi pada periode 1945-1947 yang merupakan musim dingin terburuk di Eropa hampir menghapus hasil perekonomian. Kondisi ekonomi terburuk dialami oleh Eropa Tengah dan Eropa Barat. Hal ini memunculkan rasa khawatir di kalangan penguasa Amerika Serikat bahwa kemiskinan yang meluas di Eropa akan meningkatkan popularitas komunis yang siap memanfaatkan kondisi itu untuk keuntungannya. Para penguasa Amerika Serikat menyadari bahwa tanpa adanya perekonomian yang baik maka tidak akan terwujud stabilitas politik dan perdamaian dunia.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George C. Marshall juga menyadari keberadaan masalah ini dan memerintahkan para stafnya untuk membuat program pemulihan perekonomian untuk Eropa. Marshall merumuskan garis-garis besar rencananya dalam pidatonya di Harvard University pada tanggal 5 Juni 1947. Pidato tersebut mengusulkan suatu program bantuan Amerika Serikat untuk memulihkan perekonomian Eropa dan mengisyaratkan agar negara-negara Eropa secara bersama-sama memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu diri mereka

sendiri, dan kemudian menentukan bentuk bantuan apa yang mereka butuhkan dari Amerika Serikat.

Marshall dan rekan-rekannya mendesak Eropa untuk mengambil inisiatif dalam perumusan program pemulihan perekonomian berdasarkan kebutuhan mereka. Amerika Serikat akan menyediakan bantuan finansial untuk mendukung pelaksanaan program yang dibuat berdasarkan prinsip membantu diri sendiri (*self-help*) dan pembagian sumber daya. Untuk melaksanakan fungsi operasional pemberian bantuan ekonomi kepada Eropa Barat, Kongres Amerika Serikat membentuk *the Economic Cooperation Administration (ECA)* dan negara-negara Eropa membentuk *the Organization for European Economic Cooperation (OEEC)*. Bersama dengan ECA, OEEC membuat rencana tahunan, mengalokasikan bantuan Amerika Serikat, mewujudkan konvertabilitas mata uang Eropa, dan melonggarkan hambatan produksi dan perdagangan. Hingga akhir pelaksanaannya pada tahun 1951, bantuan program Marshall Plan hampir mencapai 13 milyar dolar.

Amerika Serikat membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat karena didorong oleh tujuan ekonomi dan politik. Tujuan Amerika Serikat dalam membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat mendorong penulis untuk menganalisisnya dalam skripsi yang berjudul :

**PEMULIHAN PEREKONOMIAN EROPA BARAT
MELALUI PROGRAM MARSHALL PLAN :**

Suatu Analisis Terhadap Tujuan Bantuan Ekonomi Amerika Serikat
Kepada Eropa Barat Pasca Perang Dunia II.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dan membantu pelaksanaan analisis permasalahan secara sistematis maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup masalah. Fungsi dari pembatasan tersebut adalah sebagai pedoman kerja bagi penulis dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerancuan pengertian dan kekaburan

wilayah persoalannya.¹ Ruang lingkup masalah yang ditetapkan terdiri dari penetapan batas, waktu dan variabel-variabel penelitian.

1.2.1 Batasan Waktu

Jangkauan penelitian dibatasi pada peristiwa ekonomi politik yang terjadi antara tahun 1945 yaitu tahun berakhirnya Perang Dunia II di Eropa hingga tahun 1960. Batasan tahun 1945 digunakan dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 1945 mulai terjadi perubahan sistem moneter internasional dan perubahan perimbangan kekuatan di Eropa yang menjadi latar belakang pelaksanaan program Marshall Plan. Batasan tahun 1960 dipilih karena pada tahun tersebut telah dapat diketahui perubahan pertumbuhan perekonomian Eropa sebagai hasil dari pelaksanaan program Marshall Plan.

1.2.2 Variabel Penelitian

a. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sehingga tanpa adanya variabel bebas tidak akan muncul variabel lain tersebut, yang disebut juga variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang muncul karena pengaruh variabel bebas.² Penentuan variabel bebas dan variabel terikat dapat dilakukan dengan mengajukan dua pertanyaan. Pertama, variabel mana yang mungkin terjadi lebih dahulu? Kedua, variabel mana yang secara logika lebih masuk akal sebagai penyebab?³ Cara lain untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat dapat dilakukan melalui eksperimen dengan cara mengubah salah satu variabel dan melihat apakah variabel yang lain ikut berubah. Penciptaan perubahan pada variabel

¹ Sutrisno Hadi, *METODOLOGI RESEARCH : Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Jilid I, Penerbit ANDI OFFSET, Yogyakarta, 1991, h. 8

² Hadari Nawawi, *METODE PENELITIAN BIDANG SOSIAL*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991), h. 56

³ Mohtar Mas' oed, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, h. 129

bebas akan mempengaruhi variabel terikat, sedangkan perubahan pada variabel terikat tidak akan berpengaruh pada variabel bebas.⁴

Penyelamatan pasar Amerika Serikat di Eropa Barat dan pembendungan perluasan pengaruh Uni Soviet ke Eropa Barat menyebabkan dilaksanakannya program Marshall Plan. Tanpa adanya upaya penyelamatan pasar Amerika Serikat di Eropa Barat dan pembendungan perluasan pengaruh Uni Soviet ke Eropa Barat maka program Marshall Plan tidak akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan bahwa penyelamatan pasar Amerika Serikat di Eropa Barat dan pembendungan perluasan pengaruh Uni Soviet ke Eropa Barat sebagai variabel bebas dan pelaksanaan program Marshall Plan sebagai variabel terikat.

b. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel artinya menerjemahkan definisi mengenai variabel yang bersangkutan kedalam bentuk indikator perilaku sehingga dapat diukur.⁵ Setelah berakhirnya Perang Dunia II Eropa Barat menghadapi krisis perekonomian yang parah. Perdagangan internasional negara-negara Eropa Barat dengan negara-negara lain (termasuk dengan Amerika Serikat) mengalami hambatan. Volume ekspor Amerika Serikat ke Eropa Barat mengalami penurunan karena kemampuan Eropa Barat untuk membeli produk Amerika Serikat menurun. Amerika Serikat terancam kehilangan pasarnya di Eropa Barat. Penyelamatan pasar Amerika Serikat di Eropa Barat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem moneter internasional dan memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Barat.

Perimbangan kekuatan di wilayah Eropa pasca Perang Dunia II mengalami perubahan. Uni Soviet muncul sebagai sebuah kekuatan dominan yang mengancam keamanan Eropa Barat sekaligus mengancam eksistensi pengaruh politik Amerika Serikat di Eropa Barat. Untuk mencegah perluasan pengaruh Uni Soviet ke Eropa Barat maka Amerika Serikat melaksanakan kebijakan pembendungan.

⁴ Saifuddin Azwar, *METODE PENELITIAN*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1988, h. 44-45

⁵ *Ibid.*, h. 33

Pembendungan di Eropa Barat dilakukan Amerika Serikat dengan cara mengupayakan demokratisasi di Eropa Barat, ikut serta dalam aliansi pertahanan NATO dan memberikan bantuan militer kepada negara-negara Eropa Barat.

Program Marshall Plan dilaksanakan Amerika Serikat dengan cara memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara Eropa Barat khususnya kepada negara-negara yang pernah menjadi pusat industri di Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia II. Program Marshall Plan merupakan instrumen/alat Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya yaitu menyelamatkan pasarnya di Eropa Barat dan membendung perluasan pengaruh Uni Soviet ke Eropa Barat. Keberhasilan pelaksanaan program Marshall Plan diukur dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Eropa Barat, peningkatan ekspor Amerika Serikat ke Eropa Barat, peningkatan impor Eropa Barat dari Amerika Serikat dan gagalnya Uni Soviet memperluas pengaruhnya ke Eropa Barat.

1.3 Rumusan Permasalahan

Menurut Jujun S. Suriasumantri, perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.⁶ Masalah yang sudah berhasil dirumuskan tercermin dalam pernyataan yang bersifat jelas dan spesifik, di mana untuk menemukan jawabannya kita dapat mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teoritis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang relevan, serta memungkinkan kita untuk melakukan pengujian secara empiris terhadap kesimpulan analisis teoritis.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁶ Jujun S. Suriasumantri, *FILSAFAT ILMU : Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h. 312

⁷ *Ibid.*, h. 313

“Apakah tujuan Amerika Serikat membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat melalui program Marshall Plan?”

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Alasan Pemilihan Teori

Pemilihan teori dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat analisis dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini. Tingkat analisis akan menentukan jangkauan eksplanasi teori, apakah akan menggunakan teori yang berjangkauan eksplanasi luas (*grand theory*) atau teori yang memiliki jangkauan eksplanasi menengah (*middle range theory*). Tingkat analisis yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis induksionis dimana unit analisisnya pada tingkat negara dan unit eksplanasinya pada tingkat sistem internasional. Pada tingkat analisis ini kebijakan luar negeri suatu negara dijelaskan sebagai reaksi negara tersebut terhadap perubahan yang terjadi pada sistem internasional. Dengan demikian teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan tujuan pelaksanaan program Marshall Plan pada skripsi ini adalah teori-teori yang memiliki jangkauan eksplanasi luas (*grand theories*) yang memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan pada tingkat sistem internasional.

Pendekatan akan menentukan ruang lingkup keilmuan dari teori yang akan digunakan, apakah pada bidang ilmu ekonomi, politik atau bidang ilmu lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Ekonomi-Politik Internasional karena pelaksanaan program Marshall Plan merupakan fenomena yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi dan politik.

Untuk menjelaskan permasalahan digunakan empat teori, yaitu teori Merkantilisme, teori Ekonomi Liberal, teori Realisme Politik Internasional dan teori Geopolitik. Alasan penggunaan keempat teori tersebut ada tiga. Pertama, latar belakang ekonomi pelaksanaan program Marshall Plan adalah perubahan sistem moneter internasional dari sistem nilai tukar mata uang mengambang (*floating exchange rate*) menjadi sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) menurut sistem Bretton Woods. Perubahan sistem moneter internasional tersebut berpengaruh pada

perubahan orientasi kebijakan perdagangan luar negeri negara negara Barat (Eropa dan Amerika Serikat) dari Merkantilisme ke Liberalisme. Kedua, latar belakang politik pelaksanaan program Marshall Plan adalah perubahan sistem politik internasional pasca Perang Dunia II yaitu perubahan perimbangan kekuatan di Eropa yang memunculkan Uni Soviet sebagai satu-satunya negara yang ekonomi dan politiknya kuat di Eropa dan dinilai Amerika Serikat mengancam pasar dan pengaruh politiknya di Eropa Barat. Ketiga, kebijakan pembendungan dilatarbelakangi oleh pertimbangan geopolitik di Eropa. Untuk menjelaskan latar belakang tersebut digunakan teori Geopolitik. Keempat teori tersebut diharapkan dapat menganalisis tingkah laku ekonomi-politik luar negeri Amerika Serikat selama masa pelaksanaan program Marshall Plan, dan dari akibat-akibat yang ditimbulkannya diharapkan dapat diketahui tujuan Amerika Serikat melaksanakan program Marshall Plan.

1.4.2 Teori Merkantilisme

Merkantilisme adalah suatu sistem intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan meningkatkan kekuasaan negara. Merkantilisme adalah salah satu bentuk kebijaksanaan ekonomi kapitalis.⁸ Kebijaksanaan merkantilis melibatkan pengaturan dan partisipasi pemerintah secara luas dalam kehidupan ekonomi. Dalam merkantilisme, pemerintah mengontrol dan mengarahkan aktivitas pihak swasta agar hasil akhir dari aktivitas ekonomi nasional dapat maksimal.

Konsep merkantilisme dalam ilmu ekonomi memiliki kesamaan dengan konsep realisme dalam ilmu politik. Keduanya menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengejaran kekuasaan. Dalam pandangan merkantilisme, negara ditempatkan sebagai aktor utama (unit analisis utama) yang tingkah lakunya diasumsikan berusaha memaksimalkan kekuasaan melalui pengaturan ekonomi. Pengaturan ekonomi tersebut dilakukan melalui kebijaksanaan politik karena dalam merkantilisme pertimbangan ekonomi tunduk pada pertimbangan politik (kekuasaan).

⁸ Dudley Dillard, *ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH ATLANTIC COMMUNITY : Historical Introduction to Modern Economics*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1967, h. 163

Kaum merkantilis berasumsi bahwa sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan mengorbankan negara lain⁹. Kegiatan perdagangan internasional ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional yaitu akumulasi kekayaan. Akumulasi kekayaan didapat dengan cara melakukan ekspor sebanyak mungkin dan impor sesedikit mungkin.

Ukuran kekayaan sebuah negara menurut kaum merkantilis adalah cadangan logam mulia (emas) yang dimiliki negara tersebut. Surplus ekspor yang didapat suatu negara selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk emas. Semakin banyak cadangan emas yang dimiliki suatu negara maka semakin kaya dan kuat negara tersebut.

Menurut asumsi merkantilisme, perubahan ekonomi-politik hanya dapat terjadi apabila terjadi perubahan dalam distribusi perimbangan kekuasaan. Berdasarkan asumsi tersebut, apabila suatu negara ingin mengubah sistem ekonomi internasional yang tidak mendukung kepentingannya maka negara tersebut harus mengubah distribusi kekuatan politik internasional.¹⁰

1.4.3. Teori Ekonomi Liberal

Inti dari teori ekonomi liberal adalah pasar bebas dan minimalisasi campur tangan negara dalam proses ekonomi. Menurut Robert Gilpin, liberalisme didefinisikan sebagai sebuah doktrin atau seperangkat prinsip untuk mengatur ekonomi pasar sehingga tercapai efisiensi maksimum, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu.¹¹

Kaum liberal berasumsi bahwa individu adalah aktor utama yang berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Perilaku rasional adalah tindakan yang didasarkan pada perhitungan untung-rugi terhadap berbagai pilihan kemungkinan. Upaya individu untuk memaksimalkan perolehan dilakukan dengan

⁹ Dominick Salvatore, *EKONOMI INTERNASIONAL*, Jilid 1, Edisi Kelima, alih bahasa oleh Drs. Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997, h. 24

¹⁰ Mohtar Mas' oed, *EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, h. 20

¹¹ Umar Suryadi Bakry, *EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jayabaya, Jakarta, 1997, h. 9

memilih pilihan yang menghasilkan kepuasan subyektif tertinggi, tentunya setelah melalui perhitungan untung-rugi terhadap berbagai kemungkinan.

Perspektif liberal mengajukan argumen bahwa peningkatan kekayaan nasional akan lebih efektif jika dilakukan melalui pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional secara bebas tanpa adanya pembatasan. Atau dengan kata lain peningkatan kekayaan nasional akan lebih efektif jika dilakukan melalui perdagangan internasional dalam pasar bebas. Peranan negara harus dibatasi hanya sebagai penjamin bekerjanya mekanisme pasar bebas yaitu dengan menjamin keamanan, melindungi hak milik, mencegah praktek monopoli, membangun infrastruktur. Negara sebaiknya tidak mencampuri transaksi ekonomi yang melintasi batas nasional, bahkan harus memberi kebebasan pertukaran komoditi, menghapus hambatan terhadap arus investasi, dan mendorong penciptaan pembagian kerja-internasional sehingga setiap individu dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan.

Sebuah ekonomi pasar pada prinsipnya diatur oleh hukum permintaan. Dalam hukum permintaan, orang akan membeli barang lebih banyak jika harga murah dan akan membeli sedikit jika harga mahal. Orang juga akan membeli lebih banyak jika pendapatan tinggi dan membeli lebih sedikit jika pendapatan rendah. Menurut kaum liberal, hukum ini tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik karena setiap campur tangan logika politik hanya akan mengacaukan mekanisme pasar. Campur tangan negara sebagai lembaga politik boleh terjadi jika mekanisme pasar mengalami kegagalan atau jika campur tangan tersebut ditujukan hanya untuk penyediaan barang-barang publik.

Sifat hubungan dalam sistem ekonomi politik internasional menurut perspektif liberal adalah harmonis dan saling menguntungkan. Sumber keharmonisan dan keuntungan hubungan antar bangsa adalah ekonomi dan perdagangan. Keuntungan timbal balik dari perdagangan dan interdependensi yang terjadi dalam hubungan antar bangsa cenderung memperkuat hubungan yang kooperatif sehingga menghindarkan terjadinya konflik. Konflik dalam perdagangan internasional dapat

terjadi jika negara-negara lebih mengutamakan kepentingan ekonomi nasionalnya dengan melakukan kebijakan perdagangan internasional merkantilis seperti proteksi terhadap produk lokal dengan menetapkan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk impor, menetapkan kuota terhadap produk impor, dan melakukan devaluasi mata uang dalam negeri untuk mendorong ekspor.

Konflik dapat pula terjadi jika pertimbangan dan kepentingan politik mempengaruhi tindakan ekonomi sehingga kaum liberal berpendapat bahwa politik harus dipisahkan dari ekonomi, bahkan menurut mereka justru ekonomi yang harus menentukan politik. Menurut mereka ekonomi pasar memiliki motif yang rasional sehingga pembuatan kebijakan politik luar negeri pemerintah umumnya memperhitungkan perubahan pasar.

Liberalisme dalam bidang perdagangan menyebabkan dunia ini menjadi sebuah pasar dimana arus barang dan faktor-faktor modal dari satu negara ke negara lain berjalan dengan bebas tanpa adanya hambatan dari pembatasan-pembatasan politik. Arus barang dan faktor-faktor modal dari satu negara ke negara lain ditentukan oleh faktor efisiensi. Menurut Adam Smith, efisiensi ini akan terjadi jika ada pembagian kerja (*division of labor*) atau spesialisasi.¹²

Menurut David Ricardo, ekspor dan impor yang dilakukan suatu negara didasarkan pada keunggulan komparatif.¹³ Negara-negara yang menghasilkan produk tertentu dengan biaya relatif rendah akan cenderung melakukan ekspor. Namun jika biaya produksi suatu jenis barang lebih tinggi jika dilakukan di dalam negeri jika dibandingkan dengan biaya produksi barang yang sama di negara lain maka negara yang pertama akan cenderung melakukan impor. Dalam liberalisme perdagangan meskipun mengutamakan ekspor untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak menghambat pelaksanaan impor. Dengan demikian ekspor dan impor tetap berjalan

¹² *Ibid.*, h. 32

¹³ *Ibid.*, h. 33

sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan keunggulan komparatif.

1.4.4 Teori Realisme Politik Internasional

Morgenthau memberi definisi teori realisme politik internasional sebagai suatu teori yang memiliki keterkaitan dengan sifat hakiki manusia (*human nature*) seperti yang sesungguhnya ada dan dengan proses sejarah seperti yang sesungguhnya terjadi.¹⁴ Menurutnya, cara yang paling tepat untuk memahami politik adalah dengan memperhatikan hukum-hukum obyektif yang berakar pada hakikat manusia. Sifat hakiki manusia adalah mencari kekuasaan; manusia terlahir untuk mengejar kekuasaan. Dorongan untuk memperoleh kekuasaan ini menentukan hubungan politik manusia.¹⁵

Untuk mengetahui strategi politik luar negeri suatu negara, realisme mengemukakan beberapa cara. *Pertama*, memperkirakan tujuan dari politik luar negeri suatu negara. Hal ini dilakukan melalui analisis terhadap tindakan-tindakan politik yang dilakukan dan akibat yang dapat diperkirakan dari tindakan-tindakan itu. Dari akibat yang diperkirakan terjadi akan dapat disimpulkan tujuan dari politik luar negeri suatu negara.¹⁶ *Kedua*, dengan menempatkan diri kita dalam posisi negarawan yang harus menghadapi suatu persoalan politik luar negeri tertentu di bawah keadaan tertentu dan kita kemudian bertanya kepada diri kita sendiri mengenai alternatif-alternatif rasional apa yang mungkin dipilih oleh seorang negarawan yang harus menghadapi persoalan di bawah keadaan seperti itu dan alternatif-alternatif mana yang mungkin dipilih oleh negarawan itu.¹⁷

Realisme politik internasional mengasumsikan bahwa perilaku individual manusia digantikan oleh negara. Menurut realisme, perilaku negara dalam sistem internasional yang bersifat desentralisasi politik didasarkan pada maksimalisasi

¹⁴ Totok Sarsito, *TEORI REALISME POLITIK INTERNASIONAL HANS J. MORGENTHAU : Suatu Analisis dan Kritik*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1993, h. 12

¹⁵ Mohtar Mas'ood, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, h. 262

¹⁶ Hans J. Morgenthau & Kenneth W. Thompson, *POLITIK ANTAR BANGSA, Buku Pertama*, Edisi Keenam, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990, h. 72

¹⁷ *Ibid.*, h. 6

kepentingan nasional yaitu pengejaran kekuasaan (*power*). Karena sistem internasional bersifat desentralisasi politik dimana tidak ada suatu kekuasaan tertinggi yang mengatur perilaku negara-negara dalam sistem itu, maka pertentangan antar negara dalam upaya pengejaran kepentingan masing-masing akan mendorong timbulnya anarki dalam sistem politik internasional. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan pertentangan antar negara adalah dengan kekuatan (*power*).¹⁸

Coulombis dan Wolfe mendefinisikan *power* secara luas. Menurut mereka, segala hal yang dapat menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B dianggap sebagai *power* (kekuasaan). Faktor pembentuk *power* ada tiga, yaitu daya paksa (*force*), pengaruh (*influence*) dan wewenang (*authority*). Daya paksa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lain oleh suatu aktor terhadap aktor lain untuk mencapai tujuan politik. Pengaruh didefinisikan sebagai pemakaian faktor persuasi tanpa penggunaan kekerasan oleh suatu aktor sebagai jaminan agar perilaku aktor lain sesuai dengan kehendak aktor yang menerapkan pengaruh. Sedangkan wewenang adalah sikap tunduk secara sukarela suatu aktor kepada nasehat atau perintah aktor lain. Sikap tunduk ini muncul dari persepsi terhadap aktor yang memberikan nasehat atau perintah. Persepsi ini misalnya penghormatan, solidaritas, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian.¹⁹

Interaksi yang terjadi diantara negara-negara dalam politik internasional akan menciptakan suatu situasi interaksi, sistem interaksi, dan kebijaksanaan interaksi yang disebut sebagai *balance of power* atau perimbangan kekuasaan.²⁰ Sebagai suatu situasi interaksi, *balance of power* dapat bersifat equilibrium (keadaan dimana kekuatan benar-benar terbagi seimbang) atau bersifat disequilibrium (keadaan dimana ada kekuatan yang lebih dominan dari kekuatan yang lain yang berusaha

¹⁸ Robert J. Art & Robert Jervis, ed., *INTERNATIONAL POLITICS : Enduring Concepts and Contemporary Issues*, 3rd edition, HarperCollins Publishers Inc., New York, 1992, h. 1

¹⁹ Mohtar Mas'ood, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*, *op. cit.*, h. 138

²⁰ Totok Sarsito, *op. cit.*, h. 26

mempertahankan dominasinya). Sebagai suatu sistem interaksi, *balance of power* terwujud dari interaksi antara negara-negara yang berusaha memenuhi kebutuhannya yang paling minimum yaitu kelangsungan hidup negara (*survival*). Kelangsungan hidup negara tersebut diperoleh dengan cara mempertahankan identitas fisik, politik dan kebudayaan negara. Sebagai suatu kebijakan interaksi, *balance of power* didefinisikan sebagai "*policy of balancing*" atau kebijaksanaan menuju ke arah penyeimbangan yang didasarkan pada adanya keyakinan bahwa semua negara memiliki kecenderungan untuk memperbesar kekuatannya.

Untuk mencegah timbulnya kekuatan hegemoni, negara-negara cenderung membentuk koalisi dan kontra-koalisi, dan bahwa suatu aktor "*balancer*" akan ikut campur tangan dengan memihak pada yang lebih lemah demi memulihkan perimbangan kekuatan. Perilaku negara-bangsa dalam sistem *balance of power* tersebut ditentukan oleh struktur sistem secara keseluruhan (berimbang atau tidak berimbang), oleh ada atau tidak adanya suatu negara agresif yang ingin menciptakan hegemoni, dan adanya tokoh "*balancer*". Perilaku negara-bangsa tidak ditentukan oleh kepribadian pembuat keputusan luar negeri, dinamika sistem politik di dalam negeri, maupun ideologi yang dianut oleh suatu negara.²¹

Salah satu cara untuk mempertahankan suatu pola *balance of power*, menurut Abdul Aziz Said, Charles O. Lerche, Jr., dan Charles O. Lerche III adalah dengan membentuk aliansi.²² Aliansi adalah suatu persetujuan antara dua negara atau lebih untuk tujuan defensif atau agresif dalam upaya melawan satu negara atau lebih yang berada di luar aliansi. Kepentingan bersama merupakan pertimbangan utama pendirian suatu aliansi.

Untuk menghadapi ancaman dari negara yang lebih kuat, negara yang lemah cenderung membentuk aliansi dengan negara lain yang lebih kuat untuk menghadapi

²¹ Mohtar Mas' oed, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*, *op. cit.*, h. 48

²² Abdul Aziz Said, Charles O. Lerche, Jr., dan Charles O. Lerche III, *THE CONCEPT OF INTERNATIONAL POLITICS IN GLOBAL PERSPECTIVE*, 4th edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995, dapat dilihat di <http://www.etext.net/free/Concepts/Chapter5.htm> . Diakses pada tanggal 20 Oktober 2001.

ancaman bersama sebagai upaya untuk melakukan penyeimbangan kekuatan. Stephen M. Walt menyatakan bahwa strategi penyeimbangan tersebut didasari oleh dua alasan sebagai berikut :

... states join alliances to protect themselves from states or coalitions whose superior resources could pose a threat. States choose to balance for two main reasons. First, they place their survival at risk if they fail to curb a potential hegemon before it becomes too strong. Second, joining the weaker side increases the new member's influence within the alliance, because the weaker side has greater need for assistance.²³

Menurutnya, strategi penyeimbangan yang dilakukan oleh negara yang lemah melalui pembentukan aliansi dengan negara kuat bertujuan untuk mencegah munculnya hegemoni suatu negara yang dianggap sebagai ancaman. Dalam kasus Eropa Barat pasca Perang Dunia II, Eropa Barat merasa terancam oleh Uni Soviet sehingga beraliansi dengan Amerika Serikat untuk mencegah masuknya Uni Soviet ke Eropa Barat. Strategi penyeimbangan yang dilakukan oleh negara kuat bertujuan untuk meningkatkan pengaruhnya dalam aliansi karena negara lemah membutuhkan bantuannya. Amerika Serikat beraliansi dengan negara-negara Eropa Barat untuk membantu negara-negara tersebut sekaligus untuk menguatkan pengaruh politiknya di wilayah Eropa Barat.

Upaya penyeimbangan Amerika Serikat terhadap Uni Soviet di Eropa diwujudkan dalam kebijakan pembendungan (*containment policy*) yang diformulasikan oleh George F. Kennan. Pernyataan George F. Kennan itu ditulis dalam artikelnya yang berjudul "*The Sources of Soviet Conduct*" yang dimuat dalam Jurnal *Foreign Affairs* pada tahun 1947. Menurut Kennan yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan *the U.S. Department of State's Policy Planning Staff*, Uni Soviet akan berupaya untuk menguasai wilayah-wilayah yang mengalami *power vacuum* setelah berakhirnya Perang Dunia II sehingga tindakan Amerika Serikat yang paling efektif untuk menghadapi masalah dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Uni

²³ Robert J. Art & Robert Jervis, *INTERNATIONAL POLITICS*, *op. cit.*, h.71

Soviet adalah melalui kebijakan pembendungan²⁴. Dalam artikelnya Kennan menyebutkan bahwa :

The main element of any U.S. policy towards the Soviet Union must therefore be that of a "long-term, patient but firm and vigilant containment of Russia's expansive tendencies". This did not demand histrionics, threats or blustering, but the "adroit and vigilant application of counter-force at a series of constantly shifting geographical and political points, corresponding to the shift and manoeuvres of Soviet policies"²⁵.

Menurutnya, tekanan yang dilakukan Uni Soviet terhadap institusi-institusi bebas dari Dunia Barat adalah sesuatu yang dapat dibendung melalui kecekatan dan kewaspadaan kekuatan tandingan yang secara terus-menerus mengimbangi setiap pergerakan dan manuver kebijakan Uni Soviet dalam aspek geografi dan politik.

Kebijakan pembendungan diformulasikan Kennan berdasarkan pertimbangan geopolitik yang dipengaruhi oleh pandangan geopolitik Nicholas J. Spykman. Kennan berpendapat bahwa kekuatan militer yang memiliki kemampuan untuk mengancam Amerika Serikat hanya dapat digerakkan dari sebagian kecil wilayah di dunia. Wilayah-wilayah tersebut antara lain adalah negara-negara di Atlantik, Jepang dan Uni Soviet karena mereka memiliki kekuatan industri yang besar, memiliki akses pada bahan-bahan dasar untuk industri serta memiliki sumberdaya manusia yang terdidik dan memiliki keahlian teknis. Bagi Kennan, hubungan antara Jerman dan Uni Soviet memiliki pengaruh penting bagi keamanan Amerika Serikat.²⁶ Jika Uni Soviet mampu menguasai seluruh wilayah Jerman maka kekuatan gabungan keduanya akan sulit diimbangi oleh Amerika Serikat.

Kemungkinan ancaman yang ditimbulkan oleh Uni Soviet bagi keamanan Amerika Serikat telah diprediksikan sebelumnya oleh Nicholas John Spykman jauh

²⁴ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *CONTENDING THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS : A Comprehensive Survey*, 3rd edition, Harper & Row Publishers, New York, 1990, h.104

²⁵ Evan Luard, *BASIC TEXTS IN INTERNATIONAL RELATIONS : The Evolution of Ideas About International Society*, St. Martin's Press, New York, 1992, h. 470

²⁶ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *op. cit.*, h. 103

sebelum Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia II. Menurut Spykman, kekuatan yang akan menimbulkan masalah keamanan bagi Amerika Serikat pasca Perang Dunia II adalah Uni Soviet dan Cina. Spykman mengemukakan bahwa tujuan yang harus dicapai oleh politik luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dunia II dan setelahnya adalah mempertahankan keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) di wilayah Eropa dan Asia karena Amerika Serikat tidak memiliki sumberdaya ekonomi, militer dan teknologi yang mampu mengimbangi sumberdaya yang dimiliki wilayah Eurasia.²⁷ Pendapat Spykman tersebut didasarkan pada teori geopolitiknya tentang "Rimland" yaitu daerah pinggiran Eurasia yang terdiri atas tiga wilayah yaitu *the European coastland*, *the Arabian-Middle Eastern desertland* dan *the Asiatic monsoon*.²⁸ Dalam teorinya Spykman menyatakan bahwa wilayah pinggiran Eurasia memiliki arti strategis bagi penguasaan dunia jika pusat industri dan komunikasi diciptakan di sepanjang wilayah tersebut.²⁹

1.4.5 Teori Geopolitik

Menurut American College Dictionary, geopolitik merupakan aplikasi dari geografi, politik dan ekonomi untuk memecahkan masalah politik luar negeri suatu negara. Sedangkan menurut Webster's Dictionary, geopolitik adalah pembuatan kebijaksanaan negara yang didasarkan pada pertimbangan geografi fisik dan manusia.³⁰

Definisi geopolitik memiliki kekaburan karena banyaknya perbedaan definisi. Kekaburan definisi ini menurut Nicholas John Spykman terjadi karena istilah geopolitik telah digunakan setidaknya untuk tiga kategori pemikiran yang berbeda. Pemikiran pertama menyatakan bahwa geopolitik digunakan sebagai dasar filosofi bagi perilaku negara dan doktrin yang mendukung ekspansi teritorial. Pemikiran kedua, geopolitik disinonimkan dengan geografi politik yang menjadikannya sebagai

²⁷ *Ibid.*, h. 95

²⁸ Olin T. Mouzon, *INTERNATIONAL RESOURCES AND NATIONAL POLICY*, Harper & Brothers Publishers, New York, 1959, h. 643

²⁹ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *op. cit.*, h. 62

cabang dari studi geografi umum yang menggambarkan struktur negara dan dunia. Pemikiran ketiga menempatkan geopolitik sebagai cara perencanaan kebijaksanaan keamanan negara atas dasar faktor-faktor geografis. Spykman kemudian menyimpulkan bahwa bidang khusus dari geopolitik adalah kebijaksanaan luar negeri, dan tipe analisisnya menggunakan faktor-faktor geografi untuk membantu pembuatan kebijaksanaan luar negeri.³¹

Teori geopolitik telah dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Alfred Thayer Mahan, Halford J. Mackinder, Karl Haushofer, Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellen dan Nicholas John Spykman. Dalam skripsi ini teori geopolitik yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Mackinder dan Spykman karena keduanya meletakkan dasar bagi pembahasan geopolitik Eropa dan sejalan dengan permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini tentang konflik kepentingan Amerika Serikat dengan Uni Soviet di Eropa.

Mackinder memperkenalkan thesis tentang *heartland* dalam makalah yang berjudul *The Geographical Pivot of History* pada tahun 1904. Dengan memperhatikan peta bumi ia menyatakan adanya masa daratan (benua) yang luas yaitu gabungan benua Asia-Eropa-Afrika yang disebutnya sebagai pulau dunia (*World island*); di samping itu ada pula pulau-pulau terpencil seperti Amerika Utara dan Selatan, Australia, Britania Raya dan Jepang. Tiga perempat luas permukaan bumi berupa air, sedang sisanya yang seperempat berupa daratan. Dari seluruh daratan, dua pertiganya adalah World Island dan sepertiganya berupa benua-benua sisanya. Di World Island bertempat tinggal tujuh perdelapan umat manusia dan seperdelapan bertempat tinggal di benua-benua sisanya.

World Island dibagi Mackinder menjadi tiga kawasan. Pertama adalah wilayah yang dinamakan *pivot area* yang meliputi wilayah luas interior Eurasia yang dikelilingi pada tiga sisinya oleh pegunungan dan pada satu sisi oleh Lautan Arktika

³⁰ Olin T. Mouzon, *INTERNATIONAL RESOURCES AND NATIONAL POLICY*, Harper & Brothers Publishers, New York, 1959, h. 624

³¹ *Ibid.*, h. 625

di Utaranya. Pivot area ini kemudian diubah namanya menjadi *heartland* yang membentang dari sungai Wolga di Barat hingga Siberia di Timur. Kedua adalah *inner crescent* atau *marginal crescent* yang mengelilingi *heartland* dan meliputi seluruh bagian Eurasia yang ada di luar *heartland* dengan perincian : bagian Eropa sebelah Barat dari pegunungan Ural, Asia bagian Barat-daya tetapi di luar tanah tinggi Iran, jazirah India, Asia Tenggara serta sebagian besar Cina. Ketiga adalah wilayah yang berada di luar *inner crescent* yang disebut sebagai *outer crescent* atau *insular crescent* yang terdiri atas benua-benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, Afrika di Selatan gurun Sahara, kepulauan Britania Raya dan kepulauan Jepang. Pada tahun 1919 Mackinder merevisi gagasannya tentang *heartland* dalam buku yang berjudul *The Democratic Ideals and Reality*. Dalam buku ini cakupan *heartland* diperluas sehingga meliputi Laut Baltik (Timur), hilir bawah dan tengah sungai Donau, Laut Hitam, Asia Minor (Turki), Armenia (Kaukasus), Persia (Iran), Tibet dan Mongolia.

Mackinder menganggap Eropa Timur penting dalam rangka penguasaan dunia sehingga ia membuat diktum yang menyatakan bahwa :

Who rules East Europe commands the Heartland

Who rules the Heartland commands the World Island (Eurasia)

*Who rules the World Island commands the World*³²

Alasan Mackinder, *heartland* merupakan benteng terkuat di bumi yang kaya akan sumber daya alami dan kekuatan darat berupa transportasi kereta api trans-Siberia. Suatu negara yang mampu menguasainya dapat menduduki posisi paling berkuasa di dunia. Tetapi benteng itu adalah kelemahannya juga yaitu berupa tempat terbuka di sisi Barat daya yaitu *steppe corridor* yang rawan oleh masuknya serangan dari Eropa Timur. Pintu gerbang tersebut hanya dapat dikontrol oleh kekuatan besar di Eropa Timur sehingga dengan menguasai Eropa Timur akan dapat mengontrol *heartland*.³³ Apabila *heartland* telah dikuasai maka akan terbuka jalan untuk menguasai *Eurasia*, dan selanjutnya akan mudah untuk menguasai dunia.

³² James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *op. cit.*, h. 62

Penguasaan Uni Soviet terhadap Eropa Timur dan sebagian wilayah Jerman pasca Perang Dunia II menimbulkan kekhawatiran pada pihak Barat (Sekutu). Apabila Uni Soviet mampu menguasai seluruh wilayah Jerman maka gabungan kekuatan antara Uni Soviet dengan Jerman akan sulit untuk diimbangi oleh pihak Barat. Untuk mencegah penggabungan kekuatan Uni Soviet dan Jerman, pihak Barat mempertahankan pembagian wilayah Jerman, bahkan membantu pendirian negara Republik Federal Jerman (Jerman Barat) sebagai negara tersendiri terpisah dari Jerman Timur.

Nicholas John Spykman dalam bukunya *The Geography of Peace* (1944) mengemukakan pembagian dan penamaan benua yang berbeda dengan konsep Mackinder. Meskipun masih menyebut dataran pusat di Eurasia sebagai the *heartland*, namun pada hakekatnya disamakan dengan luasnya pengaruh politik Uni Soviet. Wilayah yang disebut *inner crescent* oleh Mackinder, diganti namanya menjadi the *Rimland* yang sebagian bersifat continental dan sebagian lagi bersifat oceanis. Lautan yang melingkari dan membatasi *rimland* dilihat Spykman sebagai lingkaran lalu lintas laut yang menyatukan the *rimland* sebagai suatu kekuatan laut. Wilayah *rimland* menurutnya adalah negara-negara yang mengelilingi the *heartland* yang terdiri atas tiga wilayah yaitu *the European coastland*, *the Arabian-Middle Eastern desertland* dan *the Asiatic monsoon*.³⁴

Spykman menyatakan bahwa "*the Rimland*" (daerah pinggiran) dari Eurasia secara strategis lebih penting daripada "*the Heartland*" jika pusat kekuatan industri dan komunikasi diciptakan di sepanjang pinggiran wilayah Eurasia.³⁵ Ia menentang diktum Mackinder dan membuat diktum penggantinya yang menyatakan bahwa :

"Who controls the rimland rules Eurasia;

*Who rules Eurasia controls the destinies of the world."*³⁶

³³ N. Daldjoeni, *DASAR-DASAR GEOGRAFI POLITIK*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 191

³⁴ Olin T. Mouzon, *op. cit.*, h. 643

³⁵ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *loc. cit.*

³⁶ Olin T. Mouzon, *op. cit.*, h. 642

Spykman berpendapat bahwa jalan untuk menguasai *Eurasia* bukanlah dengan cara menguasai Eropa Timur seperti pendapat Mackinder, tetapi menurutnya adalah dengan menguasai wilayah *rimland*. Apabila *rimland* sudah dikuasai maka akan mudah untuk menguasai *Eurasia*, dan akan terbuka jalan untuk menguasai dunia.

Menurut Spykman, kekuatan Rusia dan Cina akan menimbulkan masalah keamanan bagi AS pada masa pasca Perang Dunia II. Karena wilayah "Barat" tidak memiliki sumberdaya ekonomi, militer dan teknologi yang mampu menyaingi sumberdaya wilayah *Eurasia*, maka penting bagi AS untuk menjaga *balance of power* di Eropa dan Asia. Pemikiran Spykman ini dapat diartikan sebagai pengejaran tujuan nasional yang terbatas yang dikaitkan dengan *balance of power* dan konsep geopolitik.

Berkaitan dengan masalah Jerman dan Jepang pasca Perang Dunia II, menurut Spykman tindakan yang harus dilakukan AS terhadap kedua negara tersebut hanyalah penghapusan rezim terdahulu dan bukan penghancuran total kedua negara itu karena kedua negara tersebut nantinya harus memainkan peranan utama dalam menekan kekuatan-kekuatan yang akan bersaing dalam penguasaan wilayah *Eurasia*.³⁷

1.5 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan suatu kesimpulan sementara bagi jawaban permasalahan meskipun kebenarannya belum dapat dibuktikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad :

Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap sesuatu soal, yang dimaksudkan sebagai tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Hipotesis tersebut tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak, benar atau yang harus dapat dibenarkan oleh penyelidik, walaupun selalu diharapkan dapat menjadi demikian.³⁸

³⁷ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *op. cit.*, h. 95

³⁸ Winarno Surakhmad, *PENGANTAR PENELITIAN ILMIAH : Dasar, Metode, dan Teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1994, h. 39

Selanjutnya menurut Sutrisno Hadi :

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan.³⁹

Hipotesis yang diajukan dalam skripsi ini adalah :

Pelaksanaan program Marshall Plan ditujukan untuk menyelamatkan pasar Amerika Serikat di Eropa Barat dan untuk membendung perluasan pengaruh Uni Soviet ke Eropa Barat.

Hipotesis kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Krisis perekonomian Eropa Barat pasca Perang Dunia II, perubahan kondisi moneter internasional pada periode antara dua Perang Dunia dan ancaman kekuatan ekonomi Uni Soviet terhadap Eropa Barat mengancam keberadaan pasar Amerika Serikat di Eropa Barat. Amerika Serikat memperbaiki sistem moneter internasional bersama Inggris dan memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Barat. Upaya Amerika Serikat ini menyebabkan pulihnya kembali aktivitas perdagangan internasional di Eropa Barat. Aktivitas perdagangan internasional yang meningkat di Eropa Barat menyebabkan peningkatan ekspor Amerika Serikat ke Eropa Barat sehingga Amerika Serikat mendapatkan kembali pasar bagi produknya di Eropa Barat.

Perubahan konstelasi politik internasional di Eropa pasca Perang Dunia II memunculkan ancaman kekuatan politik dan militer Uni Soviet terhadap Eropa Barat sekaligus mengancam keberadaan pengaruh politik Amerika Serikat di Eropa Barat. Untuk menghadapi ancaman dari Uni Soviet dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di Eropa Barat, Amerika Serikat mengupayakan terlaksananya demokrasi, ikut serta dalam aliansi pertahanan NATO dan memberikan bantuan militer kepada Eropa Barat. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan di Eropa Barat akan

³⁹ Sutrisno Hadi, *op.cit*, h. 63

membendung perluasan pengaruh Uni Soviet ke Eropa Barat sekaligus menguatkan pengaruh politik Amerika Serikat di Eropa Barat.

1.6 Metode Penelitian

Hadari Nawawi memberikan definisi metode sebagai cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan tujuan umum dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah.⁴⁰ Oleh karena itu metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk memecahkan masalah.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter/bibliografis yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.⁴¹

Dalam upaya pengumpulan data bagi penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan studi kepustakaan di :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
3. Internet.

1.6.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif. Menurut Mohtar Mas'ood, strategi berpikir deduktif dilakukan dengan membuat proposisi yang berasal dari prinsip umum dan menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah (khusus). Setelah itu menguji masing-masing proposisi itu dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus-kasus khusus itu bisa dijelaskan oleh teori kita.⁴² Berdasarkan pada permasalahan maka dibuat

⁴⁰ Hadari Nawawi, *op. cit.*, h. 61

⁴¹ *Ibid.*, h. 95

⁴² Mohtar Mas'ood, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*, *op. cit.*, h. 93-94

beberapa proposisi. Kemudian ditentukan teori-teori yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjelaskan proposisi. Setelah menetapkan teori tahap selanjutnya adalah merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara bagi permasalahan. Kebenaran hipotesis kemudian diuji dengan mengamati fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.

1.6.3 Tingkat Analisis Data

Tingkat analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah tingkat analisis induksionis. Menurut Mohtar Mas' oed, analisis induksionis adalah suatu analisis yang menempatkan unit eksplanasi berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari unit analisis.⁴³ Unit eksplanasi adalah unit yang digunakan untuk meneliti dan menjelaskan suatu fenomena, sedangkan unit analisis adalah unit/fenomena yang hendak dijelaskan. Unit eksplanasi pada skripsi ini berada pada tingkat sistem internasional yaitu sistem ekonomi internasional dan sistem politik internasional, sedangkan unit analisis yang digunakan berada pada tingkat negara yaitu pelaksanaan program Marshall Plan oleh Amerika Serikat. Dengan demikian kebijakan ekonomi-politik Amerika Serikat pada pelaksanaan program Marshall Plan dijelaskan dengan memperhatikan perubahan pada sistem ekonomi-politik internasional saat itu.

1.7 Pendekatan

Pendekatan menurut The Liang Gie adalah seluruh unsur yang dipakai untuk mendekati sasaran, memasuki suatu bidang ilmu pengetahuan dan memahami pengetahuan secara teratur dan utuh tentang sasaran yang ditelaah ilmu tersebut.⁴⁴

Bantuan Amerika Serikat Kepada negara-negara Eropa Barat melalui program Marshall Plan merupakan fenomena yang termasuk dalam wilayah ekonomi dan politik. Meskipun bantuan tersebut ditujukan untuk memulihkan perekonomian negara-negara Eropa Barat, namun akibat yang ditimbulkannya tidak hanya pada bidang ekonomi yaitu pulihnya kembali perekonomian Eropa Barat tetapi juga pada

⁴³ Mohtar Mas' oed, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*, *op. cit.* h.44

bidang politik yaitu timbulnya pertentangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam perebutan pengaruh terhadap Eropa. Karena fenomena Marshall Plan berada pada wilayah ekonomi dan politik, maka pendekatan pertama yang digunakan adalah **pendekatan Ekonomi Politik Internasional (EPI)**.

Definisi EPI menurut Walter S. Jones adalah “interaksi global antara politik dan ekonomi.”⁴⁵ Jeffrey A. Frieden dan David A. Lake mendefinisikan EPI sebagai “*the study of interplay of economics and politics in the world arena.*”⁴⁶ Menurut Robert Gilpin, EPI adalah “interaksi timbal-balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekayaan dan kekuasaan dalam hubungan internasional.”⁴⁷ Pengejaran kekayaan dan kekuasaan seperti dalam definisi tersebut karakteristiknya adalah persaingan. Persaingan dalam interaksi ekonomi dan politik antar negara akan menimbulkan konflik internasional yang dapat mempengaruhi distribusi kekayaan materi dan kekuasaan politik internasional. Mohtar Mas’oed memberikan definisi EPI yang lebih luas. Menurutnya EPI adalah studi tentang keterkaitan dan interaksi antara peristiwa ekonomi dan politik, antara pasar dan negara, antara lingkungan di dalam negeri dengan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.⁴⁸

Dari beberapa definisi EPI di atas disimpulkan bahwa EPI adalah studi tentang interaksi, saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara politik (negara) dengan ekonomi (pasar) dalam upaya pengejaran kekuasaan dan kekayaan yang berjalan secara serentak. Negara lebih mengutamakan pengejaran kekuasaan, sementara pasar lebih mengutamakan pengejaran kekayaan. Interaksi, saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara politik dan ekonomi tersebut terjadi dalam suatu sistem internasional yang dinamis, sehingga pendekatan kedua yang digunakan adalah **pendekatan Sistem Internasional**.

⁴⁴ The Liang Gie, *ILMU POLITIK*, UGM Press, Yogyakarta, 1979, h. 75-76

⁴⁵ Walter S. Jones, *LOGIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL : Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatahan Dunia, Buku Kedua*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 223

⁴⁶ Mohtar Mas’oed, *EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, h. 3

⁴⁷ Walter S. Jones, *op. cit.*, h. 224

⁴⁸ Mohtar Mas’oed, *EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN*, *op. cit.*, h. 2

Menurut J. David Singer, apabila pendekatan yang digunakan memusatkan perhatian pada tingkat sistem internasional dan mementingkan peranan sistem itu dalam menentukan perilaku negara-bangsa, maka ia meminimalkan arti perbedaan yang ada di antara negara-negara. Artinya, bagaimanapun berbedanya karakteristik satu bangsa dibandingkan dengan negara lain, asalkan terlibat dalam sistem internasional yang sama, maka mereka akan berperilaku serupa. Hal ini terjadi karena sistemlah yang lebih menentukan perilaku negara-negara itu, bukan atribut individualnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku politik luar negeri suatu negara dipandang sebagai reaksi negara tersebut terhadap perubahan lingkungan eksternal yaitu perubahan yang terjadi pada sistem internasional.⁴⁹

Pendekatan ketiga yang digunakan adalah **pendekatan Historis** karena penelitian dilakukan untuk memahami kejadian atau keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang. Menurut Hadari Nawawi, dalam penelitian Historis, prosedur pemecahan masalah menggunakan data masa lalu dan peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu.⁵⁰ Program Marshall Plan dilaksanakan pada tahun 1948 dan berakhir pada tahun 1951 sehingga data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data masa lalu dan pengaruhnya terlepas dari keadaan masa sekarang.

1.8 Sistematika Skripsi

Secara keseluruhan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab I pada skripsi ini mengemukakan pertanggungjawaban metodologis. Bab II akan menguraikan tentang gambaran umum pelaksanaan program Marshall Plan. Ada lima hal yang akan digambarkan pada bab II skripsi ini. Pertama, latar belakang peristiwa yang

⁴⁹ Mohtar Mas'ood, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*, *op. cit.*, h. 48

mendorong Amerika Serikat melaksanakan program Marshall Plan. Kedua, tujuan dilaksanakannya program Marshall Plan menurut pendapat beberapa ahli. Ketiga, pengorganisasian program Marshall Plan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Keempat, pendistribusian bantuan program Marshall Plan kepada negara-negara Eropa Barat. Kelima, hasil pelaksanaan program Marshall Plan bagi Eropa Barat.

Bab III akan menjelaskan tentang upaya penyelamatan pasar Amerika Serikat di Eropa Barat. Tidak berjalannya sistem moneter internasional pada periode antara dua Perang Dunia, krisis perekonomian Eropa Barat pasca Perang Dunia II dan ancaman kekuatan ekonomi Uni Soviet terhadap Eropa Barat turut pula mengancam keberadaan pasar Amerika Serikat di Eropa Barat. Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya Amerika Serikat berupaya membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat melalui perbaikan sistem moneter internasional dan pemberian bantuan ekonomi kepada Eropa Barat sehingga perdagangan internasional khususnya di Eropa Barat dapat berjalan kembali. Kelancaran perdagangan internasional akan membantu Amerika Serikat untuk mendapatkan kembali pasarnya di Eropa Barat.

Bab IV akan menjelaskan tentang upaya Amerika Serikat untuk membendung perluasan pengaruh Uni Soviet ke Eropa Barat. Perubahan konstelasi politik internasional di Eropa pasca Perang Dunia II memunculkan Uni Soviet sebagai sebuah kekuatan yang memiliki potensi mengancam keamanan Eropa Barat. Eropa Barat memiliki arti penting bagi Amerika Serikat. Selain sebagai pasar, Eropa Barat juga merupakan wilayah pengaruh Amerika Serikat. Pembendungan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Uni Soviet di Eropa Barat akan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di Eropa Barat sekaligus akan meningkatkan pengaruh politik Amerika Serikat terhadap Eropa Barat. Sedangkan bab V merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 78-79



BAB II GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PROGRAM MARSHALL PLAN

2.1 Latar Belakang Program Marshall Plan

Latar belakang munculnya program Marshall Plan dapat ditelusuri dengan memperhatikan tiga hal penting yaitu permasalahan ekonomi Eropa Barat pasca Perang Dunia II, perubahan konstelasi politik internasional di Eropa pasca Perang Dunia II dan kekuatan perekonomian Amerika Serikat. Perubahan konstelasi politik internasional di Eropa pasca Perang Dunia II menempatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada posisi yang berseberangan. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling memperebutkan pengaruh terhadap Eropa. Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi di Eropa Barat yaitu untuk mendapatkan kembali pasar bagi produknya, sementara Uni Soviet berkepentingan untuk mempertahankan perbatasan negaranya dari kemungkinan ekspansi yang berasal dari Eropa Barat seperti yang pernah dilakukan oleh Jerman terhadap Uni Soviet. Runtuhnya perekonomian Eropa Barat menjadikan Eropa Barat rentan terhadap pengaruh Uni Soviet yang menjadi satu-satunya negara kuat di Eropa setelah Perang Dunia II. Agar Eropa Barat tidak jatuh kedalam pengaruh Uni Soviet maka Amerika Serikat berupaya untuk membangun kembali perekonomian Eropa Barat supaya Eropa Barat menjadi kuat kembali secara ekonomi dan politik. Jika Eropa Barat telah pulih kekuatannya maka diharapkan akan mampu menyerap kembali ekspor produk-produk Amerika Serikat serta akan mampu membendung pengaruh Uni Soviet. Tindakan Amerika Serikat untuk membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat dimungkinkan karena kuatnya perekonomian Amerika Serikat.

Pada tanggal 5 Juni 1947 Menteri Luar Negeri AS George C. Marshall dalam pidatonya di Harvard University memberikan usulan program yang sifatnya menyeluruh untuk membantu membangun kembali perekonomian Eropa. Menurutnya pelaksanaan program tersebut harus mendapat dukungan dan partisipasi dari negara-

negara Eropa. Mereka harus berinisiatif memikirkan cara untuk membantu diri mereka sendiri dan menentukan bentuk bantuan yang mereka butuhkan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat akan menyediakan dana bantuan dan negara-negara Eropa mendistribusikan dana tersebut untuk memulihkan perekonomian mereka.

2.2 Tujuan Pelaksanaan Program Marshall Plan

George C. Marshall mengutarakan tujuan dari bantuan ekonomi Amerika Serikat. Menurut Marshall,

Our policy is directed not against any country or doctrine but against hunger, poverty, desperation and chaos. Its purpose should be the revival of a working economy in the world so as to permit the emergence of political and social conditions in which free institutions can exist.¹

Bantuan ekonomi Amerika Serikat tersebut tidak ditujukan untuk menghadapi negara atau doktrin manapun tetapi ditujukan untuk menghapus kelaparan, kemiskinan, keputusasaan dan kekacauan. Tujuan yang akan dicapai dari pemberian bantuan ekonomi tersebut adalah pulihnya perekonomian yang mendukung terwujudnya kondisi politik dan sosial yang kondusif bagi tumbuhnya lembaga-lembaga yang bebas dan demokratis.

William Clayton menyatakan bahwa tujuan kebijaksanaan ekonomi luar negeri Amerika Serikat adalah untuk meletakkan dasar bagi perdamaian melalui ekspansi ekonomi dunia yaitu melalui peningkatan produksi, distribusi dan konsumsi barang di seluruh dunia dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan ekonomi di seluruh negara.²

¹ Bureau of Public Affairs, *THE ORIGINS OF NATO: The North Atlantic Treaty Organization*, Office of the Historian, U.S. Department of State, 1999, h. 2

² William Clayton on "The Foreign Economic Policy of The United States", November 13, 1946 dalam Arthur M. Schlesinger, Jr., & Robert Dallek, ed., *THE DYNAMICS OF WORLD POWER : A Documentary History of United States Foreign Policy 1945-1973, Volume 1 : Western Europe*, Chelsea House Publishers in association with McGraw-Hill Book Company, New York, 1973, h. 42

Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat tersebut dapat diketahui dari pernyataan William Clayton berikut :

So, let us admit right off that our objective has as its background the needs and interest of the people of the United States.

We have here a large and growing population with the highest standard of living and the greatest productive capacity in the world. Indeed, our productive capacity of many important commodities exceeds that of the rest of the world combined. That capacity, however, is geared to the production of much more of some things that our people require. Likewise, we require of many other things much more than we can produce.

Thus, the efficient operation of our productive machine leaves us with great deficits and great surpluses, which we must trade out with the rest of the world.

We need market – big markets – arround the world in which to buy and sell. We ask no special previleges in any of these markets. We hope that others will neither ask nor be granted special previleges.³

Tujuan kebijaksanaan ekonomi luar negeri Amerika Serikat dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan kepentingan rakyat Amerika Serikat yaitu kebutuhan adanya pasar untuk membeli bahan baku dan menjual produk yang dihasilkan Amerika Serikat.

Menurut Edward McNall Burns, alasan Amerika Serikat membantu pemulihan perekonomian Eropa adalah sebagai sumbangan bagi perdamaian dan juga sebagai bantuan yang efeknya akan kembali kepada Amerika Serikat yaitu untuk mempertahankan kesejahteraan ekonominya.⁴ Sedangkan menurut Harry J. Carman, dkk, program bantuan jangka panjang Amerika Serikat kepada Eropa ditujukan untuk membangkitkan kembali perekonomian Eropa dan untuk mencegah pencapaian tujuan komunisme.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Edward McNall Burns, *WESTERN CIVILIZATION :Their History and Their Culture*, 5th edition., W.W. Norton & Company Inc., New York, 1958, h. 945

⁵ Harry J. Carman, Harorld C. Syrett & Bernard W. Wishy, *A HISTORY OF THE AMERICAN PEOPLE, Volume II Since 1865*, 3rd edition., Alfred A. Knopf Publisher, New York, 1967, h. 738

Dalam Microsoft Encarta 96 Encyclopedia dinyatakan bahwa respon Amerika Serikat dalam membantu pemulihan perekonomian Eropa melalui Marshall Plan didasarkan pada empat alasan. *Pertama*, Eropa sejak lama telah menjadi pasar bagi barang-barang Amerika Serikat. Apabila Eropa hancur perekonomiannya maka Amerika Serikat akan kehilangan pasar bagi produknya, dan mungkin akan mengalami depresi ekonomi. *Kedua*, apabila Amerika Serikat tidak membantu, Eropa Barat mungkin akan jatuh ke dalam pengaruh komunisme. Kemungkinan tersebut oleh para pemimpin Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Amerika Serikat. *Ketiga*, Eropa Barat terbuka bagi masuknya pengaruh Uni Soviet yang oleh Amerika Serikat mulai dianggap sebagai lawan utamanya. *Keempat*, Jerman Barat yang dalam sejarahnya merupakan pusat industri Eropa, harus dibangun kembali sebagai penyangga melawan perluasan pengaruh komunisme Uni Soviet.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi dan politik untuk membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat. Eropa Barat sejak lama telah menjadi pasar bagi barang - barang Amerika Serikat. Apabila perekonomian Eropa Barat dibiarkan terpuruk, maka Amerika Serikat akan kehilangan pasar. Selain itu, apabila Eropa Barat tidak dibantu maka Eropa Barat dapat jatuh ke dalam pengaruh komunisme Uni Soviet dan Amerika Serikat akan kehilangan pengaruh politiknya di Eropa Barat. Melalui pelaksanaan program Marshall Plan Amerika Serikat akan dapat memulihkan perekonomian Eropa Barat dan membendung pengaruh komunisme Uni Soviet sehingga Amerika Serikat akan mendapatkan kembali pasar dan pengaruh politiknya di Eropa Barat.

⁶ Microsoft Encarta 96 Encyclopedia, "EUROPEAN RECOVERY PROGRAM", Microsoft Corporation, 1993-1995

2.3 Pengorganisasian Program Marshall Plan

2.3.1 The Conference for European Economic Cooperation

Sebagai respon terhadap pidato George C. Marshall di Harvard University, Inggris dan Perancis mengadakan pertemuan dengan pihak Uni Soviet di Paris pada tanggal 27 Juni hingga 2 Juli 1947. Inggris diwakili oleh Ernest Bevin (*Secretary of State for Foreign Affairs of the United Kingdom*), Perancis diwakili oleh Georges Bidault (*French Foreign Minister*) dan Uni Soviet diwakili oleh Vyacheslav Molotov (*Foreign Minister of the USSR*). Pertemuan tersebut bertujuan untuk menentukan keputusan atas tawaran bantuan Amerika Serikat.

Atas dasar pertimbangan politik dan ekonomi, Uni Soviet menolak untuk bekerja sama dalam program kerjasama ekonomi untuk melaksanakan program Marshall Plan. Pertimbangan Uni Soviet, jika seluruh negara Eropa sebagai suatu kesatuan ekonomi yang berada di luar dominasi Uni Soviet menjadi makmur, maka kesempatan untuk menyebarkan sistem komunis Uni Soviet akan hilang.⁷ Pada tanggal 2 Juli 1947, Molotov meninggalkan Paris. Penolakan Uni Soviet tersebut ditindaklanjuti pada September 1947 melalui pelaksanaan pertemuan di Polandia yang hasilnya berupa pembentukan *the Communist Information Bureau (Cominform)* yang tujuan utamanya untuk mengkoordinasi tindakan untuk mengimbangi Marshall Plan dan sebagai instrumen untuk mengontrol dan menyatukan Eropa Timur.⁸

Pemerintah Inggris dan Perancis memutuskan untuk meneruskan rencananya dengan mengundang 22 negara Eropa pada tanggal 4 Juli 1947 untuk berpartisipasi dalam pembentukan suatu program untuk memulihkan perekonomian Eropa. Undangan tersebut diberikan kepada pemerintah negara-negara Albania, Austria,

⁷ John D. Hicks, *THE AMERICAN NATION : A History of The United States From 1865 To The Present*, 2nd edition., The Riverside Press, Cambridge, 1949, h. 781

⁸ Kurt L. London, "Eastern Europe in the Communist World", dalam The American Assembly, *THE UNITED STATES AND EASTERN EUROPE*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1967, h. 105

Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Finland, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Switzerland, Turkey dan Yugoslavia. Pada tanggal 9 Juli 1947, Bulgaria, Poland dan Romania menolak undangan tersebut. Czechoslovakia yang pada awalnya menerima, pada tanggal 10 Juli 1947 menolak undangan tersebut bersamaan dengan penolakan Albania, Finland dan Hungary. Negara-negara yang menghadiri undangan Perancis dan Inggris kemudian melaksanakan konferensi yang dikenal dengan *the Conference for European Economic Cooperation*.

Konferensi ini mulai bersidang pada tanggal 12 Juli 1947 di Paris, di bawah kepemimpinan Ernest Bevin. Para delegasi yang hadir dalam konferensi tersebut adalah para menteri luar negeri atau menteri perdagangan negara peserta, atau para duta besar negara-negara peserta yang memiliki perwakilan di Paris.

2.3.2 The Committee for European Economic Cooperation

Hasil konferensi yang berakhir pada tanggal 13 Juli 1947 adalah terbentuknya *the Committee for European Economic Cooperation* (yang selanjutnya akan disebut "the Committee"). *The Committee for European Economic Cooperation* berbeda dari *the Conference for European Economic Cooperation* (yang selanjutnya akan disebut "the Conference"). The Conference adalah pertemuan setingkat menteri (atau di bawah menteri) di mana masing-masing anggotanya memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan atas nama negaranya. Sedangkan the Committee merupakan suatu badan yang dibentuk oleh the Conference. The Committee memiliki peraturan, status dan keanggotaan berbeda dari the Conference. Tugas the Committee adalah membuat rencana pemulihan perekonomian Eropa yang memuat perhitungan tentang kemampuan yang dimiliki negara-negara Eropa dan perhitungan dana yang dibutuhkan untuk pemulihan perekonomian. Rencana pemulihan perekonomian Eropa tersebut dibuat untuk periode 1948-1951.

Laporan rencana pemulihan perekonomian Eropa (*Paris Report*) dipresentasikan the Committee kepada the Conference pada tanggal 22 September 1947. The Conference menerima laporan itu dan kemudian mengirimkan salinannya

kepada pemerintah Amerika Serikat dan juga kepada masing-masing anggota konferensi. Laporan yang asli disimpan di Kementerian Luar Negeri Perancis (*the French Foreign Ministry*). *Paris Report* tersebut menjadi dasar bagi *the European Recovery Program (ERP)* yang dipresentasikan oleh Presiden Harry S. Truman kepada Kongres Amerika Serikat pada Desember 1947.⁹

Kongres Amerika Serikat meloloskan proposal *the European Economic Recovery Program (ERP)* pada tanggal 2 April 1948. Penerimaan Kongres tersebut diberikan setelah Presiden Truman memberikan laporan kepada Kongres Amerika Serikat tanggal 17 Maret 1948 tentang jatuhnya Czechoslovakia ke dalam pengaruh Uni Soviet melalui kudeta pada Februari 1948. Presiden Truman dalam laporannya tersebut mendesak Kongres untuk segera menerima ERP. Hasil penerimaan Kongres Amerika Serikat terhadap ERP kemudian dituangkan dalam *the Economic Cooperation Act* yang ditandatangani oleh Presiden Truman pada tanggal 3 April 1948.

2.3.3 The Economic Cooperation Administration (ECA)

The Foreign Assistance Act of 1948 atau yang lebih dikenal sebagai the Economic Cooperation Act adalah suatu bentuk perundangan yang berisi tentang kesediaan Amerika Serikat memberikan bantuan untuk membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat dan menjadi landasan bagi pelaksanaan *the European Recovery Program (ERP)*. The Economic Cooperation Act disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tanggal 3 April 1948.

Kongres Amerika Serikat memandang kondisi yang berkembang di Eropa membahayakan perdamaian, kesejahteraan umum dan kepentingan nasional Amerika

⁹ *Ibid.*

Serikat, serta pencapaian tujuan PBB.¹⁰ Untuk mengatasi kondisi tersebut maka harus dilakukan pemulihan perekonomian Eropa Barat dengan membuat rencana pemulihan ekonomi yang didukung oleh kerjasama diantara negara-negara Eropa Barat. Pemulihan perekonomian Eropa Barat dilakukan melalui peningkatan produksi, perluasan perdagangan internasional, penciptaan stabilitas mata uang Eropa Barat, dan pembangunan kerjasama ekonomi termasuk kemungkinan penciptaan stabilitas kurs mata uang dan penghapusan hambatan perdagangan. Amerika Serikat mendukung pembentukan organisasi bersama untuk melaksanakan pemulihan perekonomian Eropa Barat (OEEC) dan bersedia memberikan bantuan kepada negara-negara yang tergabung OEEC. Namun Kongres Amerika Serikat menetapkan syarat bahwa pemberian bantuan Amerika Serikat didasarkan pada prinsip menolong diri sendiri (*self-help*) dan kerjasama yang saling menguntungkan. Artinya Amerika Serikat hanya memberikan bantuan finansial sementara pengelolaannya diserahkan kepada negara-negara Eropa Barat dan pemberian bantuan tersebut haruslah membawa akibat yang menguntungkan bagi semua pihak.

Untuk melaksanakan *the Economic Cooperation Act*, Kongres Amerika Serikat membentuk *the Economic Cooperation Administration (ECA)* dengan kantor pusat di Washington D.C.. Sebuah perwakilan khusus ECA ditempatkan di Paris dan perwakilan ECA ditempatkan pula di masing-masing negara yang mendapat bantuan Marshall Plan. Presiden Truman menunjuk Paul G. Hoffman sebagai pemimpin ECA di Washington D.C. dan Averell Harriman sebagai perwakilan khusus ECA di Paris. ECA memegang kontrol penuh atas pelaksanaan pemberian bantuan di lapangan, namun dalam pembentukan kebijaksanaannya dilakukan bersama dengan U.S.

¹⁰ "*The Economic Cooperation Act Sec. 102. (a)*" dalam Arthur M. Schlesinger, Jr., & Robert Dallek, ed., *THE DYNAMICS OF WORLD POWER : A Documentary History of United States Foreign Policy 1945-1973, Volume I Western Europe*, Chelsea House Publishers in association with McGraw-Hill Book Company, New York, 1973, h. 72

Department of State. ECA menjadi pusat jaringan kerjasama yang luas antara birokrat dengan para pemimpin perusahaan swasta.

Menlu Marshall dan beberapa pejabat Amerika Serikat lain sejak awal telah meminta agar negara-negara Eropa mengambil inisiatif dan memainkan peran dalam upaya pemulihan perekonomian mereka. Hal tersebut memerlukan suatu organisasi yang memiliki kewenangan regional yang mampu berbicara atas nama Eropa sebagai suatu kesatuan.

2.3.4 The Organization for European Economic Cooperation (OEEC)

Untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat tentang pembentukan suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk berbicara atas nama Eropa, maka the Conference membentuk *the Organization for European Economic Cooperation (OEEC)* pada tanggal 16 April 1948 dengan markas di Paris.

Keanggotaan OEEC pada awalnya berjumlah 18 yang meliputi negara-negara Austria, Belgium, Denmark, France, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, Turkey, Western Germany (awalnya diwakili oleh "*The Bizone*", zona gabungan yang dikuasai Amerika Serikat dan Inggris serta zona yang dikuasai Perancis), dan *The Anglo-American Zone of the Territory of Trieste* (hingga dikembalikannya zona ini kepada Italia). Perwakilan dari masing-masing anggota OEEC duduk dalam *the Council of the Organization* di bawah pimpinan bersama Paul-Henri Spaak, Paul van Zeeland, Dirk Strikker, Anthony Eden, dan Richard Heathcoat Amory. Keanggotaan OEEC bertambah seiring dengan perubahan namanya menjadi *the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* pada September 1961 yaitu dengan masuknya Amerika Serikat dan Canada.

Amerika Serikat menginginkan OEEC menjadi instrumen integrasi Eropa sekaligus sebagai pengelola bantuan Marshall Plan. Bekerja sama dengan *the Economic Cooperation Organization (ECA)*, OEEC membuat rencana tahunan pemulihan perekonomian, mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan Amerika Serikat, dan mengurangi hambatan produksi dan perdagangan.

Tujuan OEEC terdapat dalam Article 11, "*Convention for European Economic Cooperation*", Part II : THE ORGANIZATION, yaitu :

The aim of the Organization shall be the achievement of a sound European economy through the economic co-operation of its Members. An immediate task of the Organization will be to ensure the success of the European recovery programme, in accordance with the undertakings contained in Part I of the present Convention.¹¹

Tujuan dari OEEC adalah tercapainya perekonomian Eropa yang makmur melalui kerjasama ekonomi di antara anggota-anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tindakan yang harus segera diambil adalah menjamin suksesnya program pemulihan perekonomian Eropa.

Fungsi OEEC adalah mengatur tindakan anggota-anggotanya, menyiapkan perhitungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan OEEC; menjamin efisiensi penggunaan bantuan luar negeri dan sumber daya dalam negeri untuk pemulihan perekonomian; menyediakan bantuan, informasi dan saran kepada Amerika Serikat dalam pelaksanaan program Marshall Plan; dan membantu pelaksanaan negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pelaksanaan pemulihan perekonomian Eropa. Fungsi OEEC tersebut secara tegas dapat dilihat pada Article 12, "*Convention for European Economic Cooperation*", Part II : THE ORGANIZATION, yaitu :

"..., its function shall be :

- a. to prepare and implement within the sphere of the collective action of the Members concerned, the measures necessary to achieve the aim laid down in Article 11 and to facilitate, promote and co-ordinate the individual action of the Members;
- b. to facilitate and review the implementation of the present Convention; to take such action as may be found appropriate in order to ensure its execution; and to this end, to provide for systems of observation and

¹¹ Arthur M Schlesinger, Jr., & Robert Dallek, *THE DYNAMIC OF WORLD POWER : A Documentary History of United States Foreign Policy 1945-1973, Volume I Western Europe*, Chelsea House Publishers in association with McGraw-Hill Book Company, New York, 1973, h. 93

- review adequate to ensure the efficient use both of external aid and of indigenous resources;
- c. to provide the United States Government with such assistance and information as may be agreed in relation to the execution of the European recovery programme and to address recommendations to that Government;
 - d. at the request of the interested parties, to assist in the negotiation of such international agreements as may be necessary for the better execution of the European recovery programme.
- The Organization may also assume such other functions as may be agreed.”¹²

Dalam pelaksanaannya, OEEC menjalankan 5 fungsi penting. Fungsi pertama adalah membagikan bantuan Amerika Serikat kepada anggota-anggotanya. Fungsi ini dilaksanakan dengan sukses sejak 1948 hingga 1952. Fungsi kedua adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan (*trade barriers*). OEEC telah berhasil mengurangi pengawasan terhadap impor diantara negara-negara Eropa. Sebagai hasilnya perdagangan intra-Eropa meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 1948 hingga 1954. Fungsi ketiga yaitu memperbaiki sistem pembayaran dalam perdagangan intra-Eropa. Pada tahun 1950, Council OEEC membentuk *the European Payment Union* (EPU). EPU memberikan kemungkinan bagi anggota-anggota OEEC untuk menyelesaikan perhitungan perdagangan mereka berdasarkan kesepakatan multilateral. Fungsi keempat adalah melaksanakan studi teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Eropa, seperti studi tentang pembayaran internasional (*international payment*), perdagangan internasional dan gerakan buruh. Fungsi kelima adalah menyediakan daerah perdagangan bebas yang luas dimana anggota-anggotanya akan merasakan stabilitas mata uang, peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan.

¹² *Ibid.*

2.4 Distribusi Bantuan Marshall Plan

Menurut "*the Economic Cooperation Act of 1948*", bantuan Marshall Plan sampai akhir pelaksanaannya nilainya mencapai \$13 billion. Bantuan ini diberikan kepada :

- a. any country, together with dependent areas under its administration, which signed the report of the Committee of European Economic Cooperation at Paris on September 22, 1947; and
- b. any other country (including any of the zones of occupation of Germany, any areas under international administration or control, and the Free Territory of Trieste or either if its zones) wholly or partly in Europe, together with dependent areas under its administration;¹³

Negara-negara penerima bantuan Marshall Plan tersebut berjumlah 16, yaitu Austria, Belgium, Denmark, France, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Turkey, the United Kingdom dan West Germany.

Pendistribusian bantuan Marshall Plan dapat dilihat pada tabel 2.1. Bagian terbesar dari bantuan tersebut diberikan kepada United Kingdom (\$3,189.8 million), France (\$2,713.6 million), Italy (\$1,508.8 million), West Germany (\$1,390.6 million), dan the Netherlands (\$1,083.5 million). Keempat negara tersebut merupakan negara-negara yang pernah menjadi pusat industri di Eropa. Apabila pusat-pusat industri tersebut telah pulih maka akan dapat membantu mempercepat pemulihan perekonomian seluruh negara di Eropa Barat.

¹³ *Ibid.*, h. 73

TABEL 2.1
MARSHALL PLAN AID DISTRIBUTION
 (in US \$ million)

COUNTRIES	1948-1952
United Kingdom	3,189.8
France	2,713.6
Italy	1,508.8
West Germany	1,390.6
Netherlands	1,083.5
Greece	706.7
Austria	677.8
Belgium/Luxembourg	559.3
Denmark	273.0
Norway	255.3
Turkey	225.1
Ireland	147.5
Sweden	107.3
Portugal	51.2
Iceland	29.3

Sumber : Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan CNN Interactive¹⁴

Pendistribusian bantuan program Marshall Plan tidak seluruhnya diwujudkan dalam bentuk uang tunai (U.S. dollar). Tujuh puluh persen (70%) bantuan tersebut dibelanjakan di Amerika Serikat dalam bentuk barang.¹⁵ Empat puluh persen (40%) bantuan yang diberikan kepada Inggris berbentuk makanan, bahan bakar, dan pupuk. Persentase bantuan yang berbentuk makanan juga cukup besar untuk Jerman, Austria dan Irlandia. Namun secara keseluruhan lebih dari 20% bantuan untuk Eropa dalam bentuk kendaraan, mesin, besi dan baja.

2.5 Hasil Pelaksanaan Program Marshall Plan

Program Marshall Plan dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Desember 1951, lebih awal 6 bulan dari jadwal yang ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat yaitu tanggal 30 Juni 1952. Selama hampir 4 tahun masa pelaksanaannya, program

¹⁴ Diolah dari data OECD di <http://www.oecd.org> dan CNN Interactive di <http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/episodes/03/maps/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2001.

¹⁵ Microsoft Encarta 96 Encyclopedia, *loc. cit.*

Marshall Plan telah berhasil mengatasi permasalahan pemulihan perekonomian Eropa seperti masalah produksi, perekonomian internal dan stabilisasi moneter, dan kerjasama Eropa.¹⁶ Permasalahan pemulihan perekonomian Eropa tersebut dapat diatasi melalui kerjasama antara *the Economic Cooperation Administration (ECA)* yang dibentuk oleh Amerika Serikat, dengan *the Organization for European Economic Cooperation (OEEC)* yang dibentuk oleh negara-negara Eropa.

Hingga tahun 1951, pelaksanaan program Marshall Plan membawa hasil yang cukup memuaskan. Produksi industri meningkat 64% dari produksi tahun 1947. Produksi baja meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 31 juta ton pada tahun 1947 menjadi hampir 60 juta ton pada tahun 1951. Produksi batu bara meningkat 27 %, aluminium, tembaga dan semen meningkat secara bertahap mencapai 90%. Produksi pertanian (makanan) meningkat 24% dari tahun 1947, namun karena peningkatan produksi makanan diringi juga oleh peningkatan jumlah penduduk (dari 250 juta penduduk pada tahun 1938 menjadi 275 juta penduduk pada tahun 1951) menyebabkan Eropa belum mampu mencukupi kebutuhan pangan pada tahun 1951.¹⁷

Dilihat dari segi investasi asing yang masuk ke Eropa Barat, sumbangan investasi melalui program Marshall Plan terhadap total pendapatan negara penerimanya pada periode 1948-1951 jumlahnya tidak terlalu besar yaitu sebesar 3%. Jumlah tersebut kurang lebih sebanding dengan 1/5 bagian dari keseluruhan investasi kotor yang masuk pada periode yang sama. Perhitungan tersebut dikemukakan oleh J. Bradford De Long dan Barry Eichengreen yang menyatakan bahwa :

Viewed relative to total investment in the recipient countries, the Marshall Plan was not large. Marshall Plan grants were provided at a pace not much greater in flow terms than previous UNRRA aid, and amounted to less than three percent of the combined national incomes of the recipient

¹⁶ Arthur M. Schlesinger, Jr., & Robert Dallek, ed., *THE DYNAMICS OF WORLD POWER : A Documentary History of United States Foreign Policy 1945-1973, Volume I : Western Europe*, Chelsea House Publishers in association with McGraw-Hill Book Company, New York, 1973, h 55

¹⁷ *Ibid.*, h. 103-105

countries between 1948 and 1951. They equalled less than a fifth of gross investment in recipient countries.¹⁸

Meskipun dana bantuan Marshall Plan tidak cukup besar untuk memberikan rangsangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Eropa melalui peningkatan persediaan modal Eropa, namun bukan berarti program ini mengalami kegagalan. Program Marshall Plan berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi Eropa dengan mengubah kondisi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan ekonomi. Perubahan yang ditimbulkan adalah perbaikan stabilitas keuangan, penciptaan sistem ekonomi campuran yang berorientasi pada pasar dan pemerintah, dan pemulihan sistem pembagian kerja intra-Eropa.

Dana bantuan program Marshall Plan sebagian besar digunakan untuk menyangga pengeluaran konsumsi selama masa pemulihan perekonomian Eropa Barat. Keberadaan dana tersebut merangsang peningkatan permintaan konsumsi penduduk Eropa Barat. Peningkatan permintaan pada gilirannya akan mendorong kenaikan produksi yang pada akhirnya akan memacu perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional Eropa.

Hasil dari pelaksanaan program Marshall Plan dapat dilihat dari perubahan rata-rata pertumbuhan ekonomi Eropa per tahun dari periode sebelum pelaksanaan program Marshall Plan hingga periode setelah berakhirnya program tersebut (lihat tabel 2.2).

¹⁸ J. Bradford De Long & Barry Eichengreen, *The Marshall Plan as A Structural Adjustment Program*, October 1991. Dapat dilihat pada http://www.j-bradford-delong.net/pdf_files/Marshall_Small.pdf. Diakses pada tanggal 18 Januari 2002.

TABEL 2.2
EUROPEAN GROWTH, 1890-1992
(Average Annual Growth)

Period	Real GDP (1)	Population (2)	Real GDP per Capita (3)	Real GDP per person-hour (4)
1913-1950	1.4	0.5	1.0	1.7
1950-1973	4.6	0.7	3.8	4.7

Note : GDP and population are aggregates for 12 countries (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, all adjusted for boundary changes).

Sumber : Nicholas Crafts & Gianni Toniolo, ed., *ECONOMIC GROWTH IN EUROPE SINCE 1945*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. h. 2

Pada periode 1913-1950, pertumbuhan rata-rata per tahun GDP riil Eropa adalah 1,4% dan pada periode 1950-1973 naik menjadi 4,6%. Pertumbuhan penduduk Eropa pada periode 1913-1950 adalah 0,5% dan meningkat menjadi 0,7% pada periode 1950-1973. Peningkatan jumlah penduduk Eropa dapat terjadi karena adanya dukungan dari peningkatan kesejahteraan penduduk Eropa. Apabila pendapatan meningkat maka kemampuan individu untuk membiayai keluarganya akan meningkat sehingga ia mampu menanggung biaya hidup lebih banyak orang.

Pertumbuhan rata-rata per tahun GDP riil per kapita Eropa pada periode 1913-1950 adalah 1,0% dan pada periode 1950-1973 naik menjadi 3,8%. Pendapatan per kapita penduduk Eropa tetap mengalami kenaikan meskipun jumlah populasi penduduknya meningkat. Hal ini mungkin terjadi karena tingginya kenaikan GDP riil Eropa. Sedangkan pertumbuhan rata-rata per tahun GDP riil per orang per jam kerja pada periode 1913-1950 adalah 1,7% dan naik menjadi 4,7% pada periode 1950-1973. Hal ini memperlihatkan kenaikan produktivitas tenaga kerja Eropa.

Berakhirnya program Marshall Plan bukan berarti akhir dari bantuan Amerika Serikat kepada Eropa. Bantuan Amerika Serikat kepada Eropa yang awalnya lebih banyak bersifat ekonomis dan teknis kemudian lebih terfokus pada bantuan keamanan (militer).



BAB III

PEMULIHAN PEREKONOMIAN EROPA BARAT DAN PENYELAMATAN PASAR AMERIKA SERIKAT DI EROPA BARAT

3.1 Perubahan Kondisi Moneter Internasional Antara Dua Perang Dunia

Runtuhnya sistem moneter internasional berdasarkan standar emas (*the classical gold standard*) setelah Perang Dunia I (1914) menyebabkan permasalahan moneter internasional yang semula menjadi tanggung jawab Inggris berubah kembali menjadi tanggung jawab masing-masing negara. Nilai tukar mata uang tidak lagi didasarkan pada standar emas yang ditetapkan oleh *Bank of England*, tetapi menjadi bersifat mengambang (*floating rates*). Dalam sistem nilai tukar mengambang, masing-masing negara bebas menentukan nilai tukar mata uangnya.

Menurut Joseph Schumpeter, kondisi tersebut menyebabkan negara-negara menjadi lebih mengutamakan kepentingan perekonomian dalam negerinya masing-masing berlandaskan pada pemikiran ekonomi nasionalis yang berkembang saat itu.¹ Negara-negara di Eropa melakukan proteksi terhadap produk nasionalnya dengan membatasi impor. Ekspor barang manufaktur menjadi prioritas utama. Untuk meningkatkan ekspor tersebut ditempuh kebijakan devaluasi. Dengan menurunkan nilai tukar mata uang melalui devaluasi maka harga barang domestik yang diekspor akan mampu bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Ketika semua negara melakukan kebijakan devaluasi maka harga barang di pasaran internasional menjadi tidak stabil dan perdagangan internasional menjadi terhambat. Pelaksanaan kebijakan nasionalisme ekonomi pasca runtuhnya hegemoni ekonomi Inggris menyebabkan berkurangnya volume dan nilai perdagangan internasional serta menggoyahkan stabilitas perekonomian internasional. Dampak terparah adalah terjadinya *the Great Depression* pada tahun 1930.

¹ Umar Suryadi Bakry, *EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jayabaya, Jakarta, 1997, h. 29-30

Untuk mencegah terulangnya kembali bencana ekonomi seperti *the Great Depression* 1930, pada bulan Juli 1944 negara-negara demokrasi Barat yang dipelopori oleh Amerika dan Inggris mengadakan pertemuan di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pertemuan ini membahas tentang upaya pemulihan perekonomian internasional melalui pembentukan sistem moneter baru. Sistem moneter baru yang terbentuk sebagai hasil pertemuan tersebut kemudian dikenal dengan Sistem Bretton Woods.

3.2 Permasalahan Ekonomi Eropa Barat Pasca Perang Dunia II

Eropa Barat pasca Perang Dunia II menghadapi permasalahan ekonomi serius. Permasalahan ekonomi tersebut adalah kekurangan bahan makanan dan perumahan, menurunnya tingkat produksi, kekurangan modal (dalam bentuk mata uang dolar), dan defisit neraca perdagangan (*balance of payment*).

Kekurangan bahan pangan dan perumahan serta penurunan tingkat produksi yang dialami Eropa diakibatkan oleh kerusakan akibat perang serta bencana alam yang melanda Eropa sejak 1945 hingga 1947. Perang menyebabkan kerusakan bangunan baik perumahan maupun pabrik sehingga menyebabkan terhentinya sebagian produksi industri dan kapasitas produksi menjadi berkurang.

Kekurangan modal dalam bentuk mata uang dolar disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, negara-negara Eropa Barat telah melakukan likuidasi terhadap devisanya selama tahun 1939-1940 untuk membeli bahan makanan dan peralatan perang dari Amerika Serikat. Pembelian tersebut dilakukan melalui sistem pembayaran tunai. *Kedua*, pada masa Perang Dunia II, akses Eropa Barat ke koloninya di Asia Tenggara dipotong oleh Jepang yang menguasai Asia Tenggara. Sebelum perang, Asia Tenggara merupakan penghasil dolar bagi Eropa Barat. Dari Asia Tenggara, Eropa Barat mengambil bahan baku untuk dijual ke Amerika Serikat. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang manufaktur dari Amerika Serikat dan dijual ke koloninya di Asia Tenggara. Jadi dolar yang diperoleh Eropa Barat merupakan dolar dari Asia Tenggara. Dengan terpotongnya akses ke Asia Tenggara maka pemasukan dolar Eropa Barat menjadi berkurang. *Ketiga*,

karena terjadi penambahan penduduk dan berkembangnya industrialisasi di negara-negara berkembang koloni Eropa Barat maka terjadi kekurangan jumlah bahan makanan dan bahan baku industri yang diekspor ke Eropa Barat. Pengurangan jumlah ekspor ke Eropa Barat tersebut menyebabkan pengurangan jumlah ekspor Eropa Barat ke Amerika Serikat sehingga mengurangi jumlah dolar yang diperolehnya. *Keempat*, pembangunan industri di negara-negara berkembang mengubah orientasi tipe impornya dari impor barang konsumsi menjadi impor barang produksi. Pada akhir Perang Dunia II Eropa Barat tidak mampu memenuhi kebutuhan barang produksi negara berkembang. Pasar Eropa Barat kemudian direbut oleh Amerika Serikat yang mampu menyediakan barang produksi.

Defisit neraca perdagangan (balance of payment) Eropa Barat terjadi karena runtuhnya sistem moneter internasional yang berdasar standar emas sebagai akibat Perang Dunia I dan terjadinya "*Great Depression*" selama tahun 1930-an. Perang Dunia II menyebabkan kehancuran lebih lanjut pada posisi Eropa Barat dalam perdagangan internasional.

3.3 Ancaman Uni Soviet Terhadap Ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat

Sistem ekonomi internasional pada periode pasca Perang Dunia II diwarnai oleh pertentangan antara Barat dan Timur. Dunia Barat didominasi oleh perekonomian Amerika Serikat yang juga unggul di bidang politik dan militer di atas negara-negara Eropa Barat. Amerika Serikat yang menganut sistem ekonomi liberal mendasarkan hubungan ekonomi internasionalnya pada prinsip perdagangan bebas (*free trade*) dan pergerakan modal bebas (*free-capital movement*). Dunia Timur didominasi oleh perekonomian Uni Soviet yang menganut sistem ekonomi sosialis yang berusaha mendominasi perekonomian negara-negara sosialis yang menjadi negara satelitnya demi tujuan politik dan pertahanan wilayahnya.

Karakteristik hubungan ekonomi Barat-Timur pasca Perang Dunia II merupakan pertentangan antara dua negara kuat untuk memperoleh dominasi dalam

sistem perekonomian internasional dengan mengutamakan pertimbangan politik diatas pertimbangan ekonomi dalam setiap pembuatan kebijaksanaan internasional. Karakteristik ini serupa dengan karakteristik merkantilisme yang menjadikan negara sebagai aktor utama dalam upaya dominasi perekonomian internasional untuk tujuan peningkatan kekuatan dan kekuasaan negara.

Permasalahan yang dialami perekonomian Eropa Barat pasca Perang Dunia II menjadikan Uni Soviet sebagai satu-satunya negara kaya di Eropa. Keunggulan ekonomi Uni Soviet sebagai negara komunis dianggap membahayakan bagi negara-negara Eropa Barat yang sebagian besar merupakan negara kapitalis. Negara kaya seperti Uni Soviet akan lebih kuat secara diplomatik dan lebih unggul dalam kemampuan strategis. Mereka akan mampu membiayai lebih banyak personel militer dan peralatan militer. Mereka memiliki keunggulan dalam perdagangan internasional. Mereka mampu melakukan penyyuapan terhadap politisi-politisi negara lain dan membiayai lebih banyak mata-mata. Mereka dapat menanamkan modal pada industri militer maupun pada perusahaan-perusahaan strategis di negara kapitalis karena disana semua individu dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sebaliknya di negara komunis seperti Uni Soviet semua kehidupan ekonomi dikontrol oleh pemerintah. Mereka juga mampu memberikan dukungan kepada partai-partai komunis lokal dan media massa di negara-negara Eropa Barat. Kemampuan ekonomi Uni Soviet tersebut merupakan ancaman bagi perekonomian Eropa Barat dan juga bagi Amerika Serikat karena jika Eropa Barat dikuasai oleh Uni Soviet maka Amerika Serikat akan kehilangan pasar dan sekutu strategis untuk menghadapi kekuatan Uni Soviet.

3.4 Kekuatan Perekonomian Amerika Serikat

Orientasi kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat berjalan seiring dengan perkembangan kondisi moneter internasional. Pada periode sistem moneter Standar Emas (1880-1914) yang ditandai oleh hegemoni ekonomi Inggris dan pada periode diantara dua Perang Dunia (1919-1939) yang ditandai oleh pelaksanaan

kebijakan nasionalisme ekonomi yang berlebihan, kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat terpengaruh juga oleh paham nasionalisme ekonomi (merkantilisme) yang berkembang saat itu sehingga berorientasi pada kebijakan ekonomi luar negeri yang nasionalis.

Kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat berubah ke arah internasionalisme ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi liberal ketika Amerika Serikat dan Inggris berupaya untuk membangun kembali stabilitas sistem moneter internasional melalui pembentukan sistem Bretton Woods. Pembentukan sistem Bretton Woods ini merupakan campur tangan Amerika Serikat sebagai sebuah institusi politik terhadap ekonomi internasional karena mekanisme pasar mengalami kegagalan. Sejak terbentuknya sistem Bretton Woods pada tahun 1944, Amerika Serikat lebih aktif melaksanakan perdagangan bebas atas dasar liberalisme ekonomi.

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan pelaksanaan kebijakan perdagangan bebas Amerika Serikat. *Pertama*, nasionalisme ekonomi membawa kehancuran bagi perekonomian internasional.² Bukti nyatanya adalah terjadinya malapetaka ekonomi pada tahun 1930 karena negara - negara melakukan kebijakan ekonomi nasionalis yang berlebihan setelah runtuhnya hegemoni ekonomi Inggris pasca Perang Dunia I. *Kedua*, atas dasar pertimbangan keunggulan komparatif, untuk jenis produk tertentu akan lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat untuk melakukan impor karena murahnya ongkos produksi barang yang berkualitas tinggi di negara lain. Amerika Serikat meningkatkan ekspor barang-barang manufaktur dan dan semi manufaktur yang merupakan produk yang didukung oleh keunggulan teknologi Amerika Serikat. *Ketiga*, setelah 1930 landasan ekonomi Amerika Serikat masih kuat untuk melaksanakan perdagangan bebas dan untuk menggantikan hegemoni ekonomi Inggris dalam upaya menyangga perekonomian internasional. Komponen pendukung kekuatan perekonomian Amerika Serikat adalah

² E.T. Weiler & W.H. Martin, *THE AMERICAN ECONOMIC SYSTEM : An Analytical Approach To Public Policy*. The MacMillan Company, New York, 1957, h. 595

sumberdaya alam, tenaga kerja, teknologi, modal dan kemampuan manajerial yang baik.

TABEL 3.1

**PERSENTASE DISTRIBUSI EKSPOR & IMPOR AMERIKA SERIKAT
MENURUT JENIS PRODUK, 1941-1960**

PRODUCTS	1941-1945		1946-1950		1951-1955		1956-1960	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Crude Materials	5,8	33,0	14,0	30,3	13,0	26,3	12,9	22,4
Crude Foodstuffs	1,7	16,4	8,3	18,8	7,1	19,5	7,4	14,1
Manufactured Foodstuffs	11,9	11,5	10,3	10,7	5,6	10,1	6,0	10,5
Semi Manufactured	9,4	21,2	11,1	22,3	11,6	23,7	15,0	22,1
Finished Manufactures	71,3	18,0	56,3	17,9	62,7	20,4	58,7	31,1

Sumber : Dikutip dari 'Table XIII.1 : FOREIGN TRADE OF THE UNITED STATES, 1791-1965' dalam Emma S. Woytinsky, *PROFILE OF THE U.S. ECONOMY : A Survey of Growth and Change*, Frederick A. Praeger Publishers, New York, 1967, h. 384

Pada tabel 3.1 dapat dilihat keunggulan ekonomi Amerika Serikat dari segi teknologi dan sumberdaya alam. Persentase ekspor Amerika Serikat dari tahun 1941 hingga 1960 didominasi oleh ekspor produk finished manufactures. Ekspor produk finished manufactures pada periode 1941-1945 mencapai 71,3% dari total ekspor Amerika Serikat. Pada periode 1946-1950 persentasenya turun menjadi 56,3%. Penurunan ini disebabkan oleh pengaruh terjadinya Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945 yang berakibat pada penurunan produksi. Ekspor produk finished manufactures Amerika Serikat naik kembali pada periode 1951-1955 menjadi 62,7%, tetapi kembali turun menjadi 58,7% pada periode 1956-1960. Dominasi ekspor produk finished manufactures dalam total ekspor Amerika Serikat menurut jenis produk dari tahun 1941 hingga 1960 mencerminkan keunggulan Amerika Serikat dalam memproduksi barang hasil teknologi sekaligus menunjukkan keunggulan teknologi Amerika Serikat.

Impor Amerika Serikat dari tahun 1941 hingga 1960 didominasi oleh impor crude materials. Impor crude materials pada periode 1941-1945 mencapai 33,0% dari total impor Amerika Serikat berdasarkan jenis produk. Impor crude materials pada periode 1946-1950 mencapai 30,3%, pada periode 1951-1955 mencapai 26,3% dan pada periode 1956-1960 mencapai 22,4%. Amerika Serikat memiliki kekayaan sumberdaya alam (bahan mentah) yang berlimpah, tetapi Amerika Serikat masih tetap

mengimpor bahan mentah dari negara-negara lain dengan persentase impor yang dominan untuk bahan mentah dibandingkan impor produk lain. Penyebabnya adalah impor tersebut merupakan impor bahan mentah yang tidak tersedia di Amerika Serikat atau karena Amerika Serikat memanfaatkan keunggulan komparatif negara lain dalam efisiensi produksi bahan mentah sehingga impor bahan mentah dari negara lain akan lebih murah bagi Amerika Serikat jika dibandingkan dengan memproduksi sendiri di dalam negeri.

Keunggulan faktor tenaga kerja Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel 3.2 yang menunjukkan perkembangan jumlah tenaga kerja dan persentasenya dari seluruh populasi pada periode 1929-1960.

TABEL 3.2
TOTAL LABOR FORCE, 1929-1960

YEAR	TOTAL LABOR FORCE	
	Number (in thousands)	Per cent of population *
1929	49,440	56.2
1933	51,840	55.8
1939	55,600	55.4
1943	64,560	61.6
1949	63,721	57.4
1953	67,362	57.8
1959	71,946	57.6
1960	73,126	58.3

* Aged 14 years and over

Sumber : Dikutip dari Emma S. Woytinsky, *PROFILE OF THE U.S. ECONOMY : A Survey of Growth and Change*, Frederick A. Praeger Publishers, New York, 1967, h. 104

Jumlah tenaga kerja Amerika Serikat mengalami kenaikan dari 49,44 juta jiwa pada tahun 1929 menjadi 51,84 juta jiwa pada tahun 1933, menjadi 55,6 juta jiwa pada tahun 1939 dan 64,56 juta jiwa pada tahun 1943. Kenaikan ini diasumsikan karena tenaga kerja tersebut diserap oleh industri militer dan pertahanan yang menyediakan kebutuhan perang untuk Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1941-1945. Pada tahun 1949 tenaga kerja Amerika Serikat berjumlah 63,72 juta jiwa, meningkat menjadi 67,36 juta jiwa pada tahun 1953, menjadi 71,94 juta jiwa pada tahun 1959 dan berjumlah 73,12 juta jiwa pada tahun 1960. Peningkatan jumlah

tenaga kerja tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu bertambahnya jumlah penduduk usia kerja diatas usia 14 tahun dan meningkatnya partisipasi wanita yang bekerja di luar rumah.³

Persentase tenaga kerja Amerika Serikat dari total populasi pada periode tahun 1929 hingga 1960 selalu berada di atas 50%. Tingginya persentase jumlah tenaga kerja dalam keseluruhan populasi mencerminkan tingginya produktivitas masyarakat Amerika Serikat pada periode tersebut.

Keunggulan modal yang dimiliki oleh Amerika Serikat ditunjukkan pada tabel 3.3 yang memperlihatkan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh Amerika Serikat dari tahun 1948 hingga tahun 1960.

TABEL 3.3
OFFICIAL GOLD RESERVES
SELECTED INDUSTRIALIZED COUNTRIES
(millions of dollars)

Year	Estimated World Total (1)	Western Europe							
		U.S.	Belgium	France	West Germany	Italy	Netherland	U.K. (e)	Japan
1948	34,900	24,399	624	(2)	96	167	1,856	3
1949	35,400	24,563	698	(2)	256	195	1,699	4
1950	35,490	22,820	567	737	256	311	2,900	7
1951	35,575	22,873	635	597	28	333	316	2,200	10
1952	35,815	23,252	704	582	140	346	544	1,500	16
1953	36,290	22,091	776	617	325	346	787	2,300	18
1954	36,940	21,793	778	708	626	346	796	2,550	21
1955	37,620	21,753	928	942	920	352	865	2,050	23
1956	38,105	22,056	925	924	1,494	333	844	1,800	23
1957	38,810	22,857	915	581	2,541	452	744	1,600	23
1958	39,490	20,582	1,270	750	2,639	1,086	1,050	2,850	54
1959	40,185	19,507	1,134	1,290	2,637	1,747	1,132	2,500	244
1960	40,525	17,804	1,170	1,641	2,971	2,203	1,451	2,800	247

(1) Excludes holdings of the USSR, Eastern European Countries and the China Mainland

(2) Estimates on gold reserves not available to 1950

(e) Estimate

Sumber : Harry Stark, *THE EMERGING WORLD ECONOMY*, W.M.C. Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa, 1963, h. 164

Dari total aset cadangan emas dunia (tidak termasuk Uni Soviet, Eropa Timur dan Cina) pada tahun 1948 yang berjumlah \$ 34,9 milyar, Amerika Serikat

³ Emma S. Woytinsky, *PROFILE OF THE U.S. ECONOMY : A Survey of Growth and Change*, Frederick A. Praeger Publishers, New York, 1967, h. 103

menyumbangkan bagian terbesar cadangan emas dengan nilai \$ 24,399 milyar atau sekitar 69,9% dari total cadangan emas dunia. Sementara itu Inggris diperkirakan hanya memiliki cadangan emas sejumlah \$ 1,856 milyar atau sekitar 5,3% dari total cadangan emas dunia pada tahun 1948. Meskipun demikian Inggris menempati urutan kedua dalam hal kepemilikan cadangan emas pada tahun 1948 setelah Amerika Serikat. Urutan ketiga ditempati Belgia dengan jumlah cadangan emas sebesar \$ 624 juta dan urutan keempat ditempati oleh Belanda yang memiliki cadangan emas sebesar \$ 167 juta.

Besarnya cadangan emas yang dimiliki Amerika Serikat menyebabkan negara tersebut mampu menyangga kebutuhan likuiditas dalam sistem Bretton Woods untuk mengatasi berbagai ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran negara-negara yang terlibat dalam sistem itu tanpa mempengaruhi stabilitas perekonomian dalam negeri Amerika Serikat maupun negara-negara lain.

3.5 Penyelamatan Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat di Eropa Barat

3.5.1 Arti Ekonomis Eropa Barat Bagi Amerika Serikat

Kebijaksanaan ekonomi luar negeri Amerika Serikat pasca Perang Dunia II dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan kepentingan rakyat Amerika Serikat yaitu kebutuhan terhadap pasar untuk membeli bahan baku dan menjual produk yang dihasilkan. Kebutuhan terhadap pasar tersebut telah lama dipenuhi oleh Eropa sehingga Eropa memiliki arti ekonomis bagi Amerika Serikat. Eropa merupakan pasar terbesar bagi produk Amerika Serikat. Apabila dibandingkan dengan persentase ekspor Amerika Serikat ke benua-benua lain di dunia, persentase terbesar ekspor Amerika Serikat diserap oleh Eropa (lihat tabel 3.4).

TABEL 3.4
PERSENTASE DISTRIBUSI EKSPOR AMERIKA SERIKAT
BERDASARKAN BENUA (1941-1960)

PERIODE	Amerika Utara Bagian Utara	Amerika Utara Bagian Selatan	Amerika Selatan	Eropa	Asia	Oceania	Afrika
1941-1945	13,1	5,6	4,9	56,9	7,9	3,5	8,3
1946-1950	16,0	11,8	18,0	34,8	15,4	1,6	5,2
1951-1955	18,8	10,9	15,1	23,4	13,7	1,5	3,8
1956-1960	19,7	10,2	11,4	28,0	15,8	1,8	3,6

Sumber : *Historical Statistic; Statistical Abstract*, dalam Lance E. Davis, Jonathan R.T. Hughes & Duncan M. McDougall, *AMERICAN ECONOMIC HISTORY : The Development of A National Economy* (Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc., 1965), hlm. 335

Pada periode tahun 1941-1945 persentase ekspor Amerika Serikat ke Eropa mencapai 56,9% dari total eksportnya ke seluruh dunia. Pada periode 1946-1950 dan 1951-1955 persentase ekspor Amerika Serikat ke Eropa mengalami penurunan pada nilai 34,8% dan 23,4%. Namun pada periode 1956-1960 persentase ekspor Amerika Serikat ke Eropa meningkat menjadi 28,0%. Meskipun persentase ekspor tersebut mengalami fluktuasi, namun persentase ekspor Amerika Serikat ke Eropa pada masing-masing periode dari tahun 1941 hingga 1960 tetap menduduki tempat teratas dibandingkan dengan persentase ekspor Amerika Serikat ke benua lain di dunia. Prioritas Amerika Serikat untuk melakukan ekspor ke Eropa karena Eropa dianggap penting dari segi ekonomi oleh Amerika Serikat. Eropa merupakan pasar utama bagi produk Amerika Serikat dan Amerika Serikat ingin tetap mempertahankannya.

Meskipun Eropa secara ekonomi memiliki kedudukan penting bagi Amerika Serikat bukan berarti Amerika Serikat hanya mementingkan hubungan dagang dengan Eropa. Amerika Serikat juga melakukan ekspor ke wilayah lainnya meskipun volumenya tidak sebesar ekspor ke Eropa. Hal ini menunjukkan komitmen Amerika Serikat dalam liberalisasi perdagangan untuk mewujudkan kesejahteraan global.

3.5.2 Penyelamatan Pasar Amerika Serikat di Eropa Barat

Keberadaan Eropa sebagai pasar bagi produk Amerika Serikat terancam oleh krisis ekonomi yang dialami Eropa akibat Perang Dunia II. Keterpurukan ekonomi Eropa menyebabkan pengurangan daya serap Eropa terhadap produk Amerika

Serikat, atau dengan kata lain keterpurukan ekonomi Eropa menyebabkan berkurangnya volume impor Eropa dari Amerika Serikat.

Untuk menyelamatkan pasarnya di Eropa, Amerika Serikat berusaha mengubah keseimbangan kekuatan di Eropa melalui tindakan ekonomi dengan mengambil alih inisiatif penataan sistem moneter internasional setelah runtuhnya hegemoni ekonomi Inggris pada sistem moneter berdasarkan standar emas dan memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa untuk memulihkan perekonomian Eropa Barat. Eropa Barat yang lemah secara ekonomi diberi bantuan keuangan oleh Amerika Serikat supaya perekonomiannya kuat kembali. Apabila perekonomian Eropa Barat sudah kuat kembali maka Eropa Barat akan mampu memperkuat pertahanannya dan mampu melaksanakan perdagangan internasional dengan normal. Perubahan keseimbangan kekuatan yang diciptakan Amerika Serikat di Eropa bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Eropa Barat.

Upaya pertama Amerika Serikat di bidang ekonomi untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Eropa dianggap sebagai campur tangan negara dalam perekonomian karena mekanisme pasar mengalami kegagalan. Amerika Serikat dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dimilikinya, bersama Inggris membentuk sistem moneter internasional baru yaitu sistem Bretton Woods untuk memperbaiki perekonomian internasional dan mencegah terulangnya kembali bencana ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1930. Dasar pembentukan sistem Bretton Woods adalah piagam hasil perundingan pihak Anglo-Amerika pada bulan Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, yang hasilnya adalah pembentukan dua badan keuangan internasional yaitu *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank of Reconstruction and Development* (IBRD / Bank Dunia). Pasal-pasal dalam pembentukan IMF tidak saja menciptakan landasan bagi terbentuknya suatu lembaga internasional, tetapi juga menciptakan suatu bentuk sistem moneter internasional yang bertahan hingga tahun 1960.

Tujuan berdirinya IMF untuk menjamin terselenggaranya kerjasama moneter internasional, menjaga stabilitas nilai tukar mata uang serta memperluas likuiditas internasional untuk kepentingan perdagangan internasional dan penyediaan lapangan kerja. Stabilitas nilai tukar mata uang dalam sistem Bretton Woods dijaga dengan menggunakan sistem nilai tukar tetap dimana nilai mata uang dolar Amerika ditetapkan dalam bentuk emas. Nilai 1 ons emas sebanding dengan US\$ 35. Negara-negara lain kemudian mematok nilai tukar mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat. Penetapan nilai tukar mata uang ditujukan untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar mata uang sehingga perdagangan internasional dapat berjalan dengan aman.

Stabilitas nilai tukar mata uang dianggap menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.⁴ Amerika Serikat melalui sistem Bretton Woods berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional dan investasi. Perdagangan internasional dan investasi pada gilirannya akan mempercepat pemulihan perekonomian Eropa Barat karena sejak lama perekonomian Eropa Barat ditopang oleh perdagangan.

Upaya kedua Amerika Serikat untuk membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat adalah melalui pemberian bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Barat. Amerika Serikat membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat agar daya beli negara-negara Eropa Barat meningkat sehingga mampu membeli produk-produk Amerika Serikat kembali. Dari data bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat kepada negara-negara tertentu dari tahun 1945 hingga 1964 dapat dilihat bahwa Eropa merupakan kawasan yang memiliki arti penting bagi Amerika Serikat. Tabel 3.5 menunjukkan komposisi jumlah bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada negara-negara di dunia pada periode 1945 hingga 1964.

Komposisi terbesar bantuan ekonomi Amerika Serikat dari tahun 1945 hingga tahun 1964 diberikan kepada Eropa dengan jumlah \$ 27,182 inillion. Bantuan

⁴ *Ibid.*, h. 61

ekonomi untuk Eropa sebagian besar diterima oleh negara-negara yang memperoleh bantuan program Marshall Plan seperti Inggris yang memperoleh bantuan \$ 6,410 millions, Perancis memperoleh \$ 4,443 millions, Jerman Barat memperoleh \$ 3,056 millions dan Italia yang mendapat bantuan sebesar \$ 2,883 millions. Karena pada periode tersebut sedang dilakukan upaya pemulihan perekonomian Eropa, besarnya jumlah bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada Eropa dilihat sebagai upaya Amerika Serikat untuk memulihkan perekonomian Eropa sekaligus sebagai upaya Amerika Serikat untuk menyelamatkan pasarnya di Eropa.

TABEL 3.5

**BANTUAN EKONOMI DAN TEKNIS AMERIKA SERIKAT
KEPADA NEGARA-NEGARA TERTENTU
JULI 1945 – DESEMBER 1964**

(dalam Millions of Dolar)

Negara	Total	Negara	Total	Negara	Total
EUROPE	27,182	LATIN AMERICA	4,931	NEAR EAST,	
United Kingdom	6,410	Brazil	1,517	FAR EAST, [*]	
France	4,443	Chile	634	PASIFIC	25,060
West Germany	3,056	Mexico	365	Korea	3,707
Italy	2,883	Argentina	389	India	4,299
Yugoslavia	1,848	Colombia	383	Japan	2,598
Greece	1,626	Bolivia	322	China (Taiwan)	2,070
Austria	1,088	Peru	222	Pakistan	2,245
Poland	985	Venezuela	111	Viet-Nam ^a	2,031
Spain	861	Guatemala	148	Turkey	1,637
Netherlands	830	Ecuador	106	Philippines	1,084
Belgium, Luxembourg	664	Other	734	Israel	813
Denmark	267			Iran	680
Norway	243	AFRICA	2,818	Indonesia	686
Czechoslovakia	191	U.A.R. (Egypt)	956	Jordan	443
Portugal	147	Marocco	399	Laos ^a	377
Ireland	132	Tunisia	337	Thailand	338
Sweden	87	Libya	205	Cambodia ^a	255
Finland	69	Congo (Leopoldville)	197	Indochina ^b	109
Iceland	67	Ethiopia	107	Other	1,688
Other	1,285	Other	617		
U.S.S.R	399				

^a Data untuk Viet-Nam, Laos, dan Cambodia sebelum periode 1954 diwakili oleh Indochina

^b Data untuk Viet-Nam, Laos, dan Cambodia sebelum 1954

Sumber : Emma S. Woytinsky, *PROFILE OF THE U.S. ECONOMY : A Survey of Growth and Change*, Frederick A. Praeger Publishers, New York, 1967, h. 403

Wilayah lain juga mendapatkan bantuan ekonomi dan teknis dari Amerika Serikat. Pada periode 1945-1964 Amerika Latin memperoleh bantuan sebesar \$ 4,931 millions, wilayah Afrika memperoleh bantuan sebesar \$ 2,818 millions. Sedangkan Timur Tengah, Timur Jauh dan Pasifik secara keseluruhan mendapatkan bantuan sebesar \$ 25,060 millions. Dengan memberikan bantuan ekonomi kepada wilayah-wilayah lain di luar Eropa, Amerika Serikat negara-negara yang mendapat bantuan di wilayah tersebut dapat bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang sehingga perdagangan internasional dapat berjalan lancar.

3.5.3 Kembalinya Eropa Sebagai Pasar Amerika Serikat

Perdagangan internasional di Eropa pada periode antara dua Perang Dunia lebih banyak dilakukan berdasarkan prinsip merkantilisme. Setiap negara berusaha mencari keuntungan melalui ekspor dengan mengorbankan negara lain yang perekonomiannya lemah. Akibat yang ditimbulkan adalah terhambatnya perdagangan internasional sehingga menimbulkan krisis ekonomi berat (*Great Depression*) pada tahun 1930-an. Krisis ekonomi di Eropa ini menjadi lebih parah setelah terjadi kehancuran akibat Perang Dunia II. Kedua krisis ekonomi tersebut menyebabkan volume perdagangan antara Amerika Serikat dengan Eropa Barat menurun karena kemampuan Eropa untuk menyerap produk-produk Amerika Serikat mulai berkurang. Melalui pelaksanaan program Marshall Plan, posisi Eropa dikembalikan sebagai pasar utama bagi produk Amerika Serikat. Kembalinya Eropa sebagai pasar bagi Amerika Serikat diukur dari peningkatan nilai ekspor Amerika Serikat ke Eropa sejak pelaksanaan program Marshall Plan (lihat tabel 3.6).

TABEL 3.6
THE SHARE OF EUROPE, THE U.K. AND CANADA
IN THE VALUE OF U.S. EXPORTS AND IMPORTS, 1880-1960
 (Per Cent of Total Exports and Imports)

Year	Exports To			Imports From		
	Europe ^a	U.K.	Canada	Europe ^a	U.K.	Canada
1880	86	54	3	56	32	5
1900	75	38	7	52	19	5
1920	54	27	15	23	10	12
1940	41	25	18	15	6	16
1950	31	5	20	16	4	22
1960	35	7	20	29	7	20

^a Include U.K.

Sumber : Emma S. Woytinsky, *PROFILE OF THE U.S. ECONOMY : A Survey of Growth and Change*, Frederick A. Praeger Publishers, New York, 1967, h. 389

Pada tahun 1880, 86% dari total ekspor Amerika Serikat ditujukan ke Eropa. Namun persentase ekspor tersebut dari dekade ke dekade mengalami penurunan yaitu 75% pada tahun 1900, 54% pada tahun 1920, dan 41% pada tahun 1940. Penurunan nilai ekspor Amerika Serikat ke Eropa hingga 1940 menunjukkan bahwa daya serap ekonomi Eropa terhadap ekspor produk Amerika Serikat mengalami penurunan. Penurunan daya serap Eropa pada periode 1920-1940 disebabkan oleh adanya *Great Depression* yang terjadi pada tahun 1930, sedangkan penurunan pada periode 1940-1950 disebabkan oleh hancurnya perekonomian Eropa akibat Perang Dunia II.

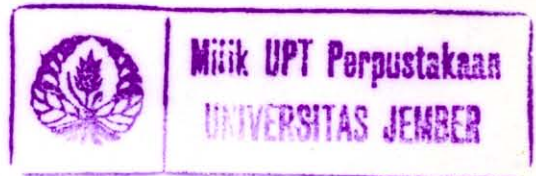
Periode tahun 1950-1960 merupakan titik balik dari ekspor Amerika Serikat ke Eropa. Persentase ekspor Amerika Serikat mulai meningkat dari 31% pada tahun 1950 menjadi 35% pada tahun 1960. Hal ini menandakan bahwa daya serap ekonomi Eropa terhadap produk ekspor Amerika Serikat mulai membaik. Peningkatan daya serap Eropa terhadap produk Amerika Serikat pada periode 1950-1960 dilihat sebagai akibat dari keberhasilan pemulihan perekonomian Eropa yang dibantu melalui program Marshall Plan dan Amerika Serikat mendapatkan kembali pasarnya di Eropa.

Inggris merupakan negara yang menjadi pasar utama bagi ekspor produk Amerika Serikat ke Eropa. Pada periode 1940-1950 peran Inggris ini mulai diambil alih oleh Canada. Pada tahun 1940, persentase ekspor Amerika Serikat ke Inggris

adalah 25% dari total ekspor Amerika Serikat, sedangkan persentase ekspor ke Canada hanya 18%. Pada tahun 1950, posisi Inggris dan Canada dalam ekspor Amerika Serikat menjadi terbalik. Inggris pada tahun 1950 hanya menyerap 5% dari total ekspor Amerika Serikat sedangkan Canada pada tahun yang sama mampu menyerap 20% dari total ekspor Amerika Serikat. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peran Eropa (terutama Inggris) sebagai pasar bagi ekspor produk Amerika Serikat mulai tergeser oleh Canada pada tahun 1950.



BAB V
KESIMPULAN



Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam pelaksanaan program Marshall Plan merupakan kebijakan yang dibuat dengan memperhitungkan perubahan pasar akibat terjadinya perubahan pada sistem moneter internasional terutama perubahan yang terjadi di wilayah Eropa. Hancurnya sistem moneter internasional pada periode antara dua Perang Dunia berakibat pada hancurnya mekanisme pasar bebas dan menurunnya volume perdagangan internasional. Penurunan volume perdagangan internasional di Eropa Barat menyebabkan penurunan volume ekspor Amerika Serikat ke kawasan itu. Amerika Serikat terancam kehilangan pasarnya di Eropa Barat. Untuk menyelamatkan pasarnya di Eropa Barat, Amerika Serikat memperbaiki sistem moneter internasional dengan membentuk sistem Bretton Woods bersama Inggris dan Amerika Serikat juga memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Barat. Kedua tindakan Amerika Serikat tersebut mengakibatkan perekonomian Eropa Barat dapat dipulihkan dengan cepat dan pertumbuhan ekonomi Eropa Barat mengalami peningkatan. Pulihnya kembali perekonomian Eropa Barat meningkatkan volume perdagangan antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa Barat sehingga pasar Amerika Serikat di Eropa Barat dapat diselamatkan.

Dilihat dari sudut pandang politik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam pelaksanaan program Marshall Plan merupakan kebijakan yang dibuat dengan memperhitungkan perubahan pada sistem politik internasional pasca Perang Dunia II yaitu munculnya Uni Soviet sebagai sebuah kekuatan dominan di Eropa. Kekuatan Uni Soviet berpotensi untuk menjadi ancaman bagi Eropa Barat melalui penguasaan Uni Soviet terhadap partai-partai komunis nasional di dalam negeri negara-negara Eropa Barat dan besarnya kekuatan militer yang dimilikinya. Meskipun ancaman militer Uni Soviet terhadap Eropa Barat tidak secara langsung mengancam keamanan Amerika Serikat karena letak geografis Amerika Serikat yang jauh dari Eropa. Tetapi

jika Eropa Barat dikuasai oleh Uni Soviet, maka Amerika Serikat akan kehilangan pasarnya di Eropa Barat dan ini juga akan melambangkan kekalahan ideologi demokrasi dalam pertempuran melawan komunisme. Selain itu, penguasaan Uni Soviet terhadap Eropa Barat juga akan mengakibatkan hilangnya pasar Amerika Serikat di Eropa Barat. Pertimbangan ekonomi-politik ini menyebabkan Amerika Serikat melaksanakan kebijakan pembendungan terhadap Uni Soviet.

Kebijakan pembendungan (*containment policy*) diformulasikan oleh George F. Kennan. Kennan mengikuti pendapat Spykman yang menelaah peta bumi dan memandang bahwa *the Rimland* lebih penting dibandingkan dengan *the Heartland*. Karena Uni Soviet menguasai sebagian besar wilayah *heartland*, untuk mencegah penguasaan Uni Soviet atas *rimland* (khususnya wilayah Eropa Barat) maka Kennan mengusulkan untuk membendung Uni Soviet. Menurut argumen *balance of power*, untuk mencegah timbulnya kekuatan hegemoni maka negara-negara cenderung membentuk koalisi dan kontra-koalisi, dan aktor balancer akan muncul untuk membantu memulihkan perimbangan kekuatan dengan memihak pada yang lemah. Upaya pembendungan Amerika Serikat di bidang politik dan militer dilaksanakan dengan cara mendorong demokratisasi Eropa Barat, ikut serta dalam aliansi pertahanan NATO, dan memberikan prioritas bantuan militer kepada Eropa Barat. Melalui pelaksanaan kebijaksanaan pembendungan ini Amerika Serikat memosisikan diri sebagai *balancer* bagi Uni Soviet. Dengan membendung pergerakan Uni Soviet ke Eropa Barat maka Amerika Serikat akan mampu mempertahankan pengaruh politiknya dan menyelamatkan pasarnya di Eropa Barat.

Keberhasilan pelaksanaan program Marshall Plan memang masih layak untuk diperdebatkan. Namun dengan pengajuan beberapa indikator untuk membuktikan keberhasilan pelaksanaan program tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa perekonomian Eropa Barat memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada masa-masa setelah dilaksanakan program Marshall Plan. Apakah hanya karena adanya faktor program Marshall Plan semata yang menyebabkan keberhasilan pemulihan perekonomian Eropa Barat? Hal ini masih memerlukan

pembuktian yang lebih mendetail. Setidaknya dengan upaya pembuktian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa program Marshall Plan telah membantu pemulihan perekonomian Eropa Barat pada tahap awal melalui upaya untuk merangsang peningkatan permintaan [konsumsi] penduduk Eropa Barat yang berakibat pada peningkatan produksi. Peningkatan produksi mendorong dilaksanakannya perdagangan sehingga perdagangan internasional dapat berjalan kembali sebagai sarana untuk mendistribusikan kesejahteraan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Art, Robert J., & Robert Jervis, ed., *INTERNATIONAL POLITICS : Enduring Concepts and Contemporary Issues*, 3rd edition, HarperCollins Publishers Inc., New York, 1992
- Bureau of Public Affairs, *THE ORIGINS OF NATO THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION*, Office of the Historian U.S. Department of State, April 1999
- Burns, Edward McNall, *WESTERN CIVILIZATION : Their History and Their Culture*, 5th edition, W.W. Norton & Company Inc., New York, 1958
- Carman, Harry J., Harold C. Syrett & Bernard W. Wishy, *A HISTORY OF THE AMERICAN PEOPLE, Volume II Since 1865*, 3rd edition, Alfred A. Knopf Publisher, New York, 1967
- Clough, Shepard B. & Richard T. Rapp, *EUROPEAN ECONOMIC HISTORY : The Economic Development of Western Civilization*, 3rd edition, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., Tokyo, 1975
- Dahlan Nasution, *POLITIK INTERNASIONAL : Konsep dan Teori*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991
- Davis, M. Jane, ed., *SECURITY ISSUES IN THE POST COLD WAR WORLD* Edward Elgar Publishing Company, U.S., 1989
- Dillard, Dudley, *ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH ATLANTIC COMMUNITY : Historical Introduction to Modern Economics*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1967
- Dougherty, James E., & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *CONTENDING THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS : A Comprehensive Survey*, 3rd edition, Harper & Row Publishers, New York, 1990
- Easton, Stewart C., *THE WESTERN HERITAGE*, Holt, Rinehart & Winston Inc., New York, 1961
- Grampp, William D. & Emanuel T. Weiler, ed., *ECONOMIC POLICY : Readings in Political Economy*, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1961
- Gyorgy, Andrew, ed., *PROBLEMS IN INTERNATIONAL RELATIONS*, 3rd ed., Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1970

- Hadari Nawawi, *METODE PENELITIAN BIDANG SOSIAL*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991
- Hicks, John D., *THE AMERICAN NATION : A History of The United States From 1865 To The Present*, 2nd edition, The Riverside Press, Cambridge, 1949
- Hyde-Price, Adrian G.V., *EUROPEAN SECURITY BEYOND THE COLD WAR : Four Scenarios for the Year 2010*, The Royal Institute of International Affairs, London, 1991
- Isaak, Robert A., *EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995
- Jacobson, Harold Karan, ed., *AMERICA'S FOREIGN POLICY*, Random House, Inc., New York, 1965
- Jones, Walter S., *LOGIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL 2 : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatanan Dunia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Jujun S. Suriasumantri, *FILSAFAT ILMU : Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Link, Arthur S. & William B. Catton, *AMERICAN EPOCH : A History of the United States Since the 1890's*, Volume III (1938-1966), Alfred A. Knopf Publisher, New York, 1963
- Luard, Evan, *BASIC TEXTS IN INTERNATIONAL RELATIONS : The Evolution of Ideas about International Society*, St. Martin's Press, New York, 1992
- Mohtar Mas' oed, *EKONOMI-POLITIK INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994
- Mohtar Mas' oed & Colin MacAndrews, *PERBANDINGAN SISTEM POLITIK*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000
- Morgenthau, Hans J. & Kenneth W. Thompson, *POLITIK ANTARBANGSA*, Yayasan Obor Indonesia, 1990
- Mouzon, Olin T., *INTERNATIONAL RESOURCES AND NATIONAL POLICY*, Harper & Brothers Publishers, New York, 1959

- N. Daldjoeni, *DASAR-DASAR GEOGRAFI POLITIK*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Office of Public Affairs, *THE DEVELOPMENT OF THE FOREIGN RECONSTRUCTION POLICY OF THE UNITED STATES From MARCH-JULY 1947*, U.S. Department of States, Washington, September 1947
- Palm, Franklin C. & Charles R. Webb. Jr., *WESTERN CIVILIZATION, Volume III : From The Eighteen Century to the Present*, 2nd edition, D. Van Nostrand Company, Inc., New Jersey, 1958
- S. Nasution & M. Thomas, *BUKU PENUNTUN MEMBUAT TESIS, SKRIPSI, DISERTASI, MAKALAH*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Saifuddin Azwar, *METODE PENELITIAN*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1988
- Salvatore, Dominick, *EKONOMI INTERNASIONAL*, Jilid 1, Edisi Kelima, alih bahasa oleh Drs. Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997
- _____, *EKONOMI INTERNASIONAL*, Jilid 2, Edisi Kelima, alih bahasa oleh Drs. Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997
- Schlesinger, Jr., Arthur M., & Robert Dallek, ed., *THE DYNAMICS OF WORLD POWER : A Documentary History of United States Foreign Policy 1945-1973, Volume I : Western Europe*, Chelsea House Publishers in association with McGraw-Hill Book Company, New York, 1973
- Schlesinger, Jr., Arthur M., & Walter LaFeber, ed., *THE DYNAMICS OF WORLD POWER : A Documentary History of United States Foreign Policy 1945-1973, Volume III : Eastern Europe & the Soviet Union*, Chelsea House Publishers in association with McGraw-Hill Book Company, New York, 1973
- Stark, Harry, *THE EMERGING WORLD ECONOMY*, W.M.C. Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa, 1963
- Sudarsono, Juwono, et.al., *PERKEMBANGAN STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN TANTANGAN MASA DEPAN*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1996

Sutrisno Hadi, *METODOLOGI RESEARCH : Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi, Jilid I*, Penerbit ANDI OFFSET, Yogyakarta, 1991

The American Assembly, *THE UNITED STATES AND EASTERN EUROPE*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1967

The Liang Gie, *ILMU POLITIK*, UGM Press, Yogyakarta, 1979

Totok Sarsito, *TEORI REALISME POLITIK INTERNASIONAL HANS J. MORGENTHAU : Suatu Analisis dan Kritik*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1993

Umar Suryadi Bakry, *EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jayabaya, Jakarta, 1997

Wellborn, Fred W., *DIPLOMATIC HISTORY OF THE UNITED STATES*, Littlefield, Adam & Co., New Jersey, 1961

Winarno Surakhmad, *PENGANTAR PENELITIAN ILMIAH : Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994

SUMBER INTERNET :

Abdul Aziz Said, Charles O. Lerche, Jr., dan Charles O. Lerche III, *THE CONCEPT OF INTERNATIONAL POLITICS IN GLOBAL PERSPECTIVE*, 4th edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995, dapat dilihat di <http://www.etext.net/free/Concepts/Chapter5.htm> . Diakses pada tanggal 20 Oktober 2001.

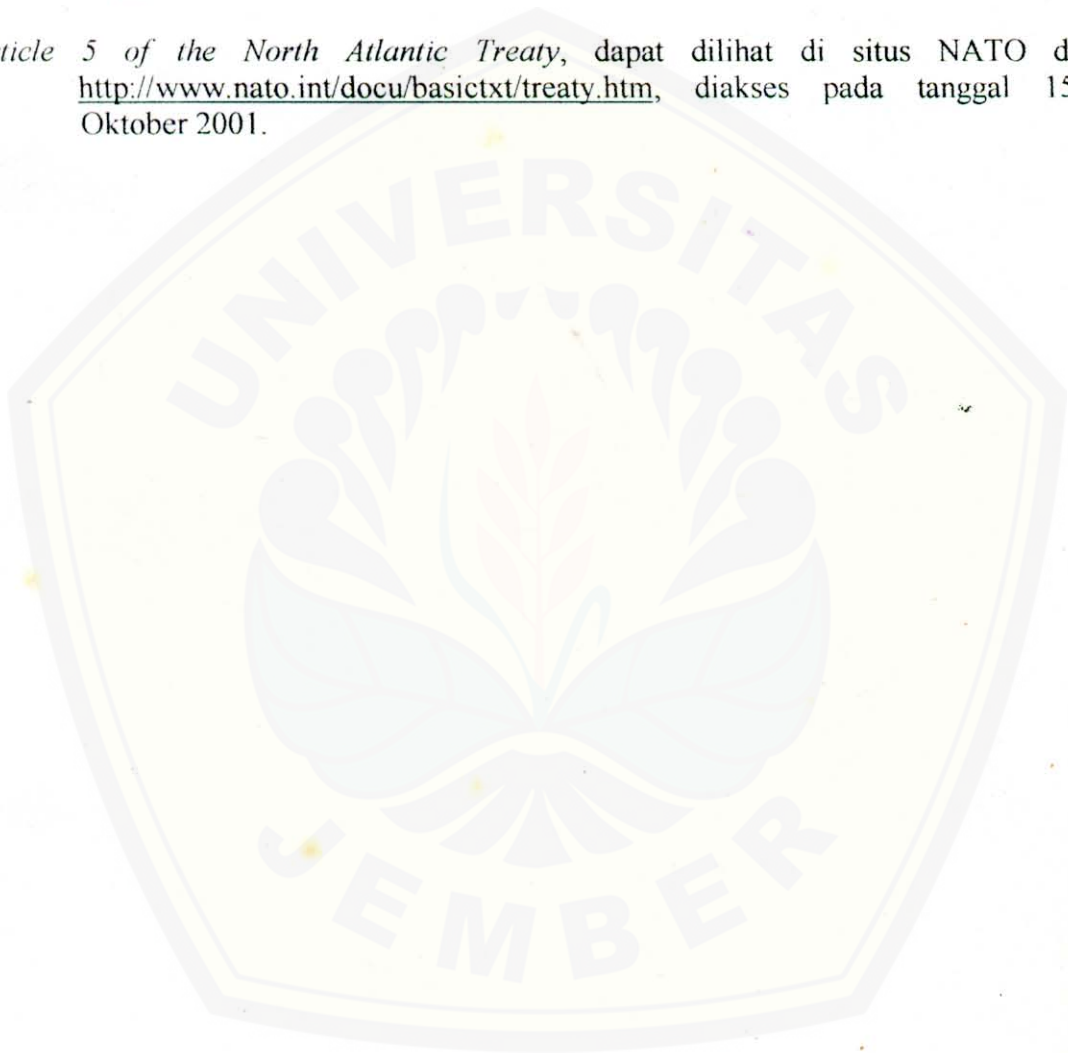
D.M. Giangreco & Robert E. Griffin, *AIRBRIDGE TO BERLIN – The Berlin Crisis of 1948, Its Origins and Aftermath*, 1988, dapat dilihat pada situs **Project WhistleStop** di http://www.whistlestop.org/study_collections/berlin airlift/large/berlin airlift.htm. Diakses tanggal 10 Oktober 2001.

John Lewis Gaddis, *STRATEGIES OF CONTAINMENT : A Critical Appraisal of Postwar American National Security*, Oxford University Press, 1982, dalam "Containment", NuclearFiles.org (a project of the Nuclear Age Peace Foundation), dapat dilihat di <http://www.nuclearfiles.org/strategy/containment.html> Diakses tanggal 29 Oktober 2001.

J. Bradford De Long & Barry Eichengreen, *The Marshall Plan as A Structural Adjustment Program*, October 1991. Dapat dilihat pada http://www.j-bradford-delong.net/pdf_files/Marshall_Small.pdf. Diakses pada tanggal 18 Januari 2002.

OECD di <http://www.oecd.org> dan CNN Interactive di <http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/episodes/03/maps/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2001.

Article 5 of the North Atlantic Treaty, dapat dilihat di situs NATO di <http://www.nato.int/docu/basicxt/treaty.htm>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2001.



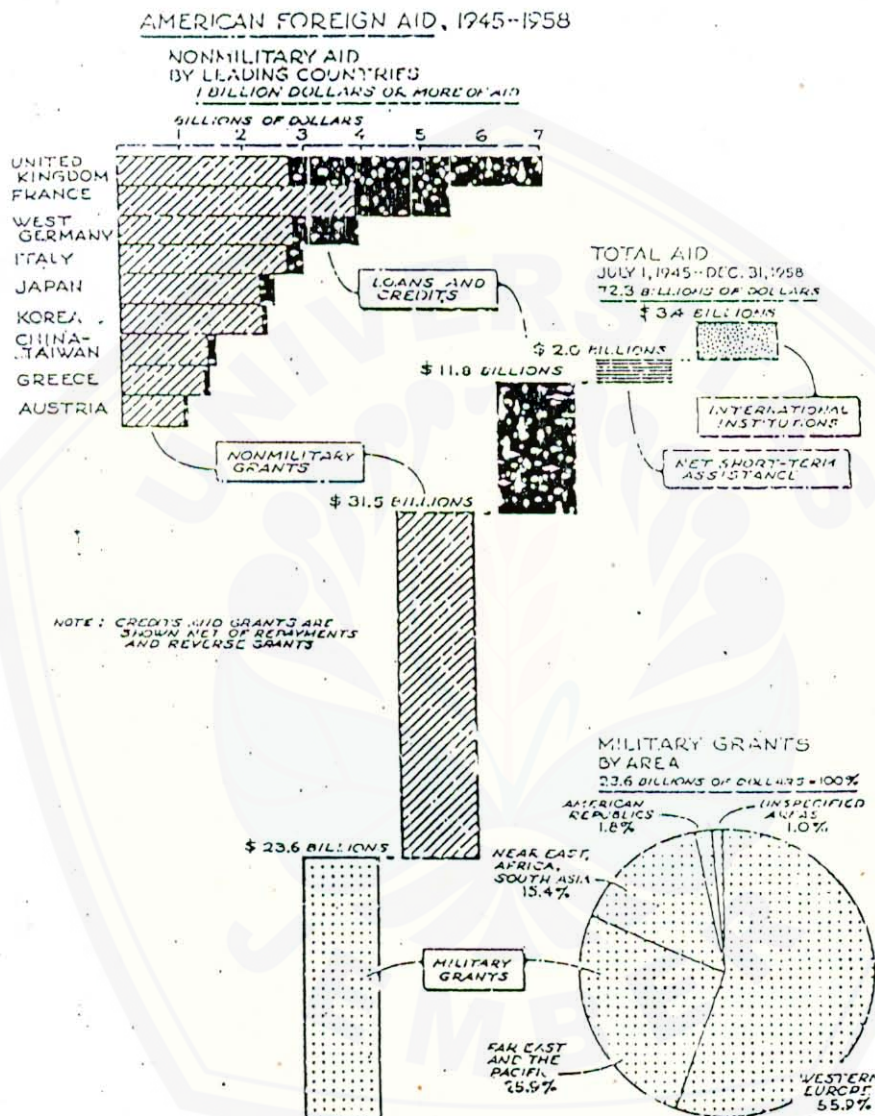


NEGARA-NEGARA PENERIMA BANTUAN MARSHALL PLAN



Sumber : <http://lcweb.loc.gov/exhibits/marshall/wholemap.jpg> dan
<http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/episodes/03/maps/>

AMERICAN FOREIGN AID, 1945-1958



Arthur S. Link & William B. Catton, AMERICAN EPOCH: A History of the United States Since the 1890's, Volume III 1938-1966, (New York: Alfred A. Knopf Publisher, 1963), hal. 711

CENTRAL & EASTERN EUROPE TERRITORIAL CHANGES, 1939-1947



Arthur S. Link & William B. Catton, AMERICAN EPOCH: A History of the United States Since the 1890's, Volume III 1938-1966, (New York: Alfred A. Knopf Publisher, 1963), hal. 697

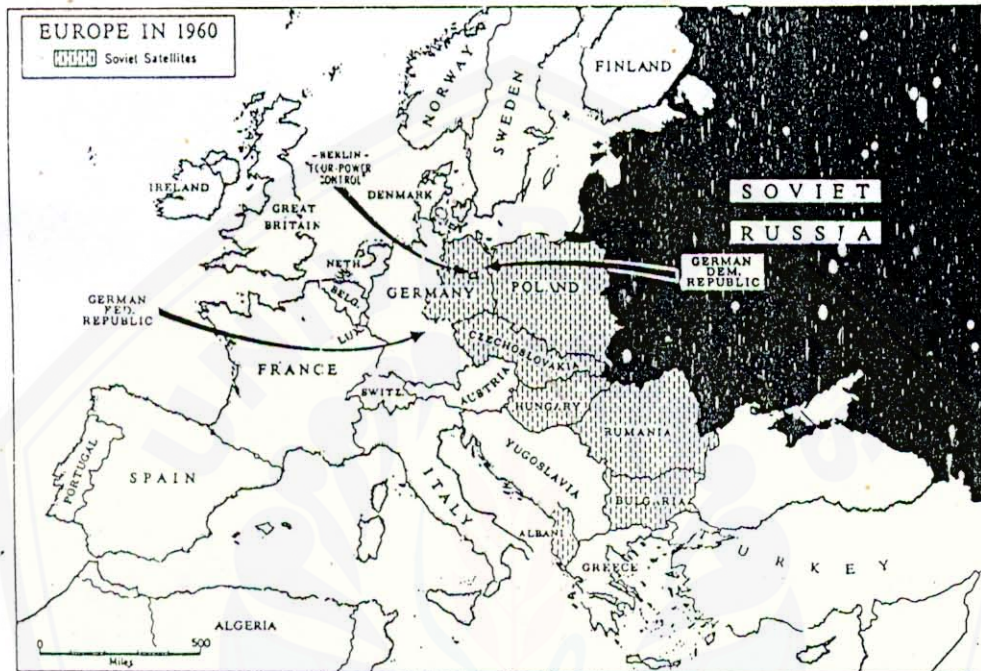
EROPA TIMUR SEBAGAI PENYANGGA PERTAHANAN SOVIET*



Eropa Timur dilihat sebagai penyangga pertahanan Soviet.

* Walter S. Jones, LOGIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL 1 : Persepsi Nasional, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 37

EUROPE IN 1960*



* Stewart C. Easton, *THE WESTERN HERITAGE*, Holt, Rinehart & Winston, Inc., New York, 1961, p. 824



SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

NOMOR : 301/Jember.1/TU.3/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : KRISNA ARIADI
 NIM : 960910101041
 Jur/Program : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
 Fakultas : ISIP
 Angkatan : 1996

Terhitung mulai bulan Juli 2001 sampai bulan September 2001 telah

mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan judul sebagai PEMULIHAN PEREKONOMIAN EROPA BARAT MELALUI PROGRAM MARSHALL berikut : PLAN : Suatu Analisis Terhadap Tujuan Bantuan Ekonomi Amerika Serikat Kepada Eropa Barat Pasca Perang Dunia II

Tanggal	Tempat			
	R. Sirkulasi	R. Referen	R. OR	R. Stripsi
23-07-2001	X			
30-07-2001	X			
06-08-2001	X			
13-08-2001	X			
18-08-2001	X			
28-08-2001	X			
03-09-2001	X			
11-09-2001	X			
19-09-2001	X			



Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01-10- 2001
 An. Kepala
 Kasubag. TU
 Dra. Hj. Budiwanti, S.sos
 NIP. 130 682 191